

Indikator Kesejahteraan Rakyat *Welfare Indicators* 2012



Indikator Kesejahteraan Rakyat *Welfare Indicators* 2012



<http://yogyakarta.bps.go.id>

**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2012**
WELFARE INDICATORS OF DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2012

No. Katalog - *Catalog Number* : 4102004.34
No. ISSN - *ISSN Number* : 0215 - 4746
No. Publikasi - *Publication Number* : 34522.11.18

Naskah - *Manuscript* :
Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat - *Welfare Statistics Sub. Division*
Bidang Statistik Sosial – *Social Statistics Division*

Gambar Kulit/*Cover Design*:
Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat - *Welfare Statistics Sub. Division*

Diterbitkan oleh - *Published by* :
Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
BPS - Statistics of D.I.Yogyakarta Province

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya.
May be cited with reference to the source.

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat 2012 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menyajikan data tentang tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat dari waktu ke waktu. Data yang digunakan bersumber dari data primer hasil survei BPS (Survei Sosial Ekonomi Nasional dan Survei Angkatan Kerja Nasional) serta instansi lain di luar BPS.

Publikasi ini menyajikan statistik dan indikator kesejahteraan rakyat yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan maupun evaluasi terhadap upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Statistik yang dicakup meliputi antara lain aspek kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan, serta sosial lainnya. Dengan demikian, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2012 diharapkan mampu menjembatani dan memperkecil kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan data.

Kepada semua pihak yang telah secara aktif berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini, disampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saran untuk perbaikan publikasi sangat diharapkan bagi penyajian di masa mendatang.

Yogyakarta, Oktober 2013

**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
Kepala,

Ir. Wien Kusdiatmono, MM
NIP: 19561120 197903 1 001

This annual publication of Welfare Indicators 2012 is published by BPS-Statistics of Daerah Istimewa Yogyakarta Province. It presents the information on welfare status, its trends and variation among regency/city. It presents statistical information calculated from the latest data available at BPS-Statistics of Daerah Istimewa Yogyakarta Province and other institutions.

This publication includes the measurable aspects of welfare/quality of life reports. They are population, health and nutrition, education, employment, consumption, housing and social concern. We hope that the publication qualifies itself to fill the gap between availability and the need of respective information.

We sincerely appreciate to whom has kindly made significant contribution to this publication. Finally, we are always appreciate to any comment on this publication for further improvement of the similar publications in the coming years.

Yogyakarta, Oktober 2013

***BPS-Statistics of Daerah Istimewa Yogyakarta Province
Head,***

Ir. Wien Kusdiatmono, MM
NIP: 19561120 197903 1 001

Indikator Kesejahteraan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta 2012 merupakan publikasi tahunan yang menyajikan gambaran tingkat kesejahteraan rakyat dari waktu ke waktu. Data disajikan dalam bentuk tabel persentase dan grafik. Pada beberapa tabel ulasan, data yang disajikan dibedakan juga menurut jenis kelamin untuk melihat ada tidaknya perbedaan gender pada aspek tertentu.

Dalam publikasi ini, kesejahteraan rakyat diamati dari berbagai aspek yang spesifik, yaitu kependudukan, kesehatan, pendidikan, angkatan kerja, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan permukiman, serta sosial lainnya.

Peningkatan taraf kesejahteraan rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang kesehatan antara lain terlihat dari kenaikan Angka Harapan Hidup. Pada tahun 2012 Angka Harapan Hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan dari 73,22 tahun menjadi 73,27 tahun. Dari sisi kesehatan lainnya, banyaknya penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan yang lalu pada tahun 2012 sebesar 36,37 persen, dengan keluhan terbanyak adalah batuk (17,26 persen) dan pilek (15,95 persen).

Dari aspek ketenagakerjaan pada tahun 2012, sektor perdagangan, rumah makan, dan restoran merupakan lapangan usaha utama di dalam penyerapan tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kondisi dan kualitas rumah yang ditempati dapat menunjukkan keadaan sosial ekonomi rumah tangga. Semakin baik kondisi dan kualitas rumah yang ditempati dapat menggambarkan semakin baik keadaan sosial ekonomi suatu rumah, pada 2012 persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih sebagai sumber air minum sedikit mengalami penurunan dari tahun lalu, yaitu dari 89,12 persen menjadi 89,37 persen. Sementara itu persentase rumah tangga dengan lantai bukan tanah mencapai lebih dari 93,88 persen pada tahun 2012. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta pada 2012 mengalami kenaikan 10,6 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu penduduk yang menunaikan ibadah haji pada 2012 mengalami penurunan sebesar 5,41 persen di bandingkan tahun 2011.

The 2012 Welfare Indicators of Daerah Istimewa Yogyakarta is annual publication to present the information on welfare status from time to time that distinguished by regency/city. In this publication the aspects of welfare in concern are population, health, education, labour force, consumption level and patterns, housing and settlement, and socio culture.

The significant improvement in welfare status of society in health is reflected in increases of Life Expectancy at Birth (e_0). Life expectancy of D. I. Yogyakarta increased from 73,22 to 73,27 years in 2012. The percentage of population who had health complaints during the reference month was 36,37 percent, with most frequent problems befalling the population was cough (17,26 percent) and cold (15,95 percent).

Trade, restaurant, and Hotel sector is the main industry in absorbing employment in Daerah Istimewa Yogyakarta. Almost 30 percent Population 15 years old and over was recorded have jobs in Trade, restaurant, and Hotel industry.

Condition and quality of houses occupied by household may indicate socio economic condition of household. The better of condition and quality of the houses shows the better of socio economic level of household. In 2012, the housing indicators such as percentage of drinking water owned decreased compare to 2011. From the point of view of floor material, there were more than 93,88 percent of household occupied houses with non earth floor material. The numbers of tourists in 2011 who visited Yogyakarta increased, meanwhile the number of pilgrim going to Mecca decreased in 2012 (5,41 percent).

Daftar Isi / Contents

	Halaman <i>page</i>
Kata Pengantar/ <i>Preface</i>	iii-iv
Abstraksi/ <i>Abstract</i>	v-vi
Daftar Isi/ <i>Contents</i>	vii
Singkatan dan Akronim/ <i>Abbreviation and Acronyms</i>	viii
Penjelasan Teknis/ <i>Technical Notes</i>	ix-xiv
Pendahuluan/ <i>Introduction</i>	xv-xvi
1. Kependudukan/ <i>Population</i>	1-7
2. Kesehatan/ <i>Health</i>	8-15
3. Pendidikan/ <i>Education</i>	16-24
4. Angkatan Kerja/ <i>Labour Force</i>	25-29
5. Taraf dan Pola Konsumsi/ <i>Consumption Level and Patterns</i>	30-37
6. Perumahan dan Permukiman/ <i>Housing and Settlement</i>	38-44
7. Pariwisata dan Keagamaan / <i>Tourism and Religion</i>	45-50
Lampiran/ <i>Appendix</i>	51-62
Daftar Pustaka/ <i>References</i>	63

Singkatan dan Akronim/ *Abbreviation and Acronyms*

KB	Keluarga Berencana/ <i>Family Planning</i>
AKB/IMR	Angka Kematian Bayi/ <i>Infant Mortality Rate</i>
AHH/e ₀	Angka Harapan Hidup/ <i>Expectancy of Life</i>
ASI	Air Susu Ibu/ <i>Breast Feeding</i>
AMH	Angka Melek Huruf/ <i>Literacy Rate</i>
S D/PS	Sekolah Dasar/ <i>Primary School</i>
S L T P/ JHS	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/ <i>Junior High School</i>
S L T A/ SHS	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ <i>Senior High School</i>
APS	Angka Partisipasi Sekolah/ <i>School Participation Ratio</i>
APK	Angka Partisipasi Kasar/ <i>Gross Enrollment Ratio</i>
APM	Angka Partisipasi Murni/ <i>Net Enrollment Ratio</i>
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/ <i>Labour Force Participation Rate</i>
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka/ <i>Open Unemployment Rate</i>
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional/ <i>National Socio Economic Survey</i>
SP/ PC	Sensus Penduduk/ <i>Population Census</i>
SDKI	Survei Demografi Kesehatan Indonesia/ <i>Demography Health Survey</i>

1. **Penduduk menurut kelompok umur** adalah pengelompokan penduduk berdasarkan umur, dan biasanya dikelompokkan ke dalam kelompok interval 5 tahunan yang dimulai dari usia 0 tahun.
2. **Kepadatan Penduduk/Km²** adalah rata-rata jumlah penduduk per km².
3. **Laju Pertumbuhan Penduduk** adalah ukuran rata-rata kecepatan penambahan penduduk per tahun.
4. **Angka Beban Tanggungan** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang pada usia yang tidak produktif (umur dibawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan banyaknya orang yang termasuk usia produktif (umur 15-64 tahun).
5. **Umur Perkawinan Pertama** menunjukkan umur saat seseorang melangsungkan upacara perkawinan yang pertama.
6. **Rumah Sakit** adalah tempat pemeriksaan dan perawatan kesehatan yang biasanya dibawah pengawasan dokter/tenaga medis.
7. **Puskesmas** adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat

disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.

8. **Seseorang dikatakan dapat membaca dan menulis** apabila ia dapat membaca dan menulis surat/kalimat sederhana dengan suatu huruf.

9. AMH (Angka Melek Huruf)

Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas.

10. Angka Partisipasi Kasar

Persentase antara jumlah murid SD/SLTP/SLTA dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun/13-15 tahun/16-18 tahun.

11. Angka Partisipasi Murni

Perbandingan antara murid SD/SLTP/SLTA usia 7-12 tahun/13-15 tahun/16-18 tahun dengan penduduk usia 7-12 tahun/13-15 tahun/16-18 tahun (dalam persentase).

12. Angka Putus Sekolah

Persentase antara jumlah penduduk usia 7 tahun/13 tahun/16 tahun ke atas yang putus sekolah di SD/SLTP/SLTA dengan jumlah penduduk usia 7 tahun/13 Tahun/16 Tahun ke atas.

13. **Masih Bersekolah** adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C), yang berada di

bawah pengawasan Kemdiknas, kementerian Agama (Kemenag), Instansi Negeri lain maupun Instansi Swasta.

14. Rasio murid terhadap guru SD/SLTP/ SLTA :

$$\frac{\text{Jumlah murid SD/SLTP/SLTA}}{\text{Jumlah guru SD/SLTP/SLTA}}$$

15. Rasio murid per kelas SD/SLTP/ SLTA :

$$\frac{\text{Jumlah murid SD/SLTP/SLTA}}{\text{Jumlah kelas SD/SLTP/SLTA}}$$

16. **Angkatan Kerja** adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

17. **Bekerja** adalah mereka yang selama seminggu yang lalu melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan dan bekerja paling sedikit 1 (satu) jam berturut-turut dalam seminggu yang lalu.

18. **Pengangguran** adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged workers*), atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja/mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (*future starts*).

19. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT):

$$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

20. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK):

$$\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas}} \times 100\%$$

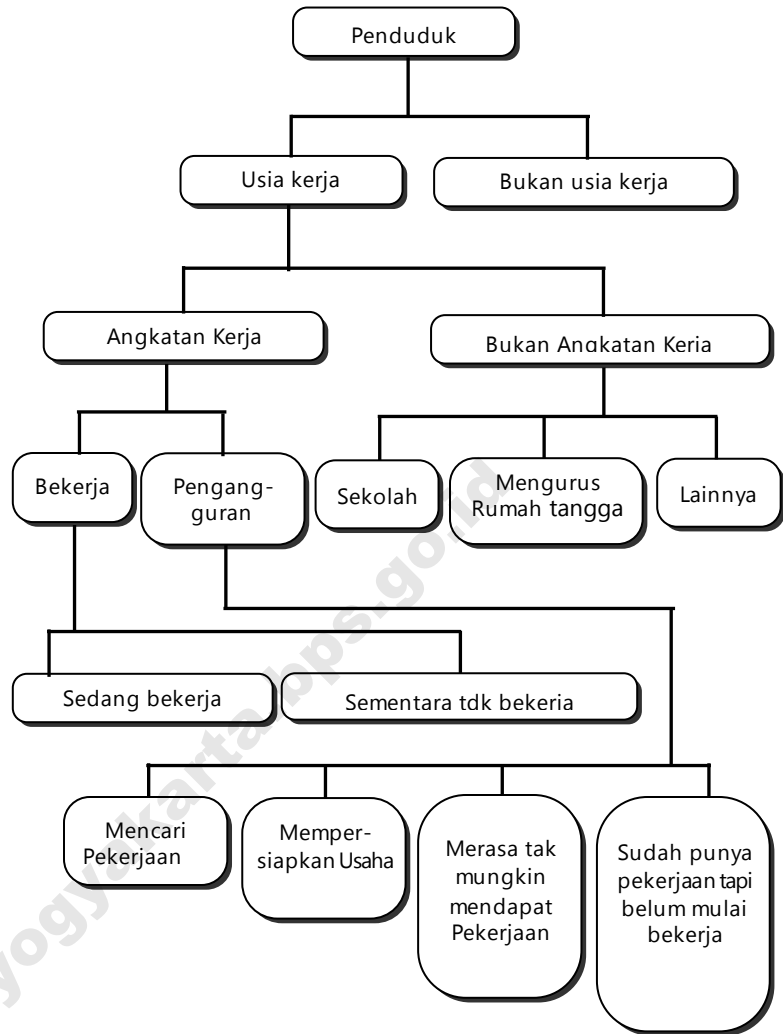
21. **Mencari pekerjaan** adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, baik mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.

22. **Bukan Angkatan Kerja** adalah bagian dari tenaga kerja (*manpower*) yang tidak bekerja ataupun bukan pengangguran, seperti sekolah, mengurus rumah tangga atau tua dan cacat.

23. **Sekolah** adalah kegiatan bersekolah di sekolah formal baik pendidikan dasar, pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. Tidak termasuk yang sedang libur (mulai tahun 2010 termasuk non formal).

24. **Mengurus Rumah Tangga** adalah penduduk 15 tahun keatas yang selama seminggu yang lalu mengurus rumah tangga atau membantu mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah/gaji.

25. Bagan Ketenagakerjaan:



26. **Status Pekerjaan** adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan.

27. **Lapangan Usaha** adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja, atau yang dihasilkan oleh perusahaan/kantor tempat responden bekerja.

28. **Konsumsi Rumah Tangga** adalah pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan. Kelompok makanan mencakup pengeluaran konsumsi bahan makanan, makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Sedangkan kelompok bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah dsb.

29. **Indeks Gini** adalah ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Koefisien Gini terletak antara nol yang mencerminkan pemerataan sempurna dan satu yang menggambarkan ketidakmerataan sempurna.

30. **Pengeluaran rata rata perkapita sebulan** adalah rata rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.

Tujuan

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi D.I Yogyakarta 2011 merupakan publikasi yang diterbitkan setiap tahun oleh BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Informasi statistik yang disajikan memberi gambaran mengenai kesejahteraan masyarakat dan perubahan sosial yang terjadi selama tahun 2009-2011.

Ruang Lingkup

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) menyajikan gambaran mengenai taraf kesejahteraan rakyat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, perkembangannya antar waktu serta perbandingan antar kabupaten/kota. Publikasi ini menyajikan indikator-indikator input, proses dan output untuk memberikan gambaran tentang investasi dari berbagai program peningkatan kesejahteraan rakyat serta proses dan manfaat dari program tersebut.

Dimensi Kesejahteraan Rakyat disadari sangat luas dan kompleks, sehingga suatu taraf kesejahteraan rakyat tidak hanya dapat terlihat (*visible*) dari suatu aspek tertentu. Dalam publikasi ini kesejahteraan rakyat diamati dari beberapa aspek yang spesifik, yaitu aspek Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, serta Sosial Lainnya.

Dalam pengertian yang luas sangat tidak mungkin untuk menyajikan statistik atau indikator yang mampu untuk mengukur kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Oleh karena itu, indikator yang disajikan dalam terbitan ini hanya menyangkut segi-segi kesejahteraan yang dapat diukur (*measurable welfare*).

Sumber Data

Sumber data utama Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) 2010 ini merupakan data primer, dalam arti dikumpulkan dan diolah sendiri oleh Badan Pusat Statistik, baik BPS Pusat maupun BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti Sensus Penduduk (SP), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenar), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan lain-lain. Data primer yang telah disebut di atas mempunyai keterbatasan sebagai sumber informasi publikasi tahunan.

Upaya untuk menyediakan sumber data yang tetap bagi publikasi Inkesra telah dilakukan melalui perluasan cakupan pertanyaan pokok (data kor) Susenas yang diadakan setiap tahun. Dengan demikian publikasi Inkesra mempunyai sumber data yang pasti dan berkesinambungan sehingga selalu dapat menyajikan data yang relatif *up to date*. Selain menggunakan data primer publikasi ini juga mengolah data sekunder yang berasal dari instansi-instansi pemerintah yang terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kanwil Departemen

Pembangunan dapat digambarkan sebagai suatu proses perubahan menuju kondisi yang lebih baik. Pembangunan memerlukan berbagai sumber daya antara lain sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Salah satu sumber daya yang paling menentukan keberhasilan pembangunan adalah sumber daya manusia yaitu penduduk, disamping juga aset atau sumber daya lainnya. Penduduk dalam hal ini diposisikan menjadi pelaku sekaligus sebagai objek dari pembangunan itu sendiri.

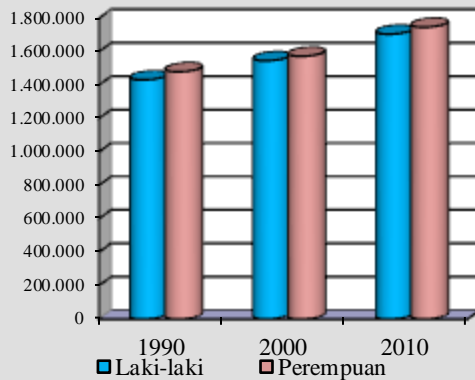
Penduduk selain sebagai pendukung pembangunan, juga dapat menjadi penghambat proses pembangunan. Semakin banyak jumlah penduduk seharusnya semakin banyak pelaku pembangunan dan diharapkan juga akan memberikan *input* pembangunan yang bernilai lebih. Jumlah penduduk yang banyak dan diikuti dengan kualitas yang baik, maka penduduk akan menunjang pembangunan. Sedangkan kondisi dimana jumlah penduduk yang banyak namun dengan kualitas yang minim hanya akan menghambat pembangunan.

Menurut **Coale-Hoover Theory** (1950), laju pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menghambat pembangunan sosial ekonomi.

Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembangunan adalah masalah kependudukan, antara lain meliputi jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan dalam menangani permasalahan penduduk, maka kebijakan pembangunan kependudukan diarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengarahannya mobilitas penduduk. Dengan demikian diharapkan tercipta penduduk yang berkualitas dan tersebar merata di seluruh wilayah sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara adil dan merata.

Laju pertumbuhan penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2000-2010 sebesar 1,04 persen

Gambar 1.1: Perkembangan Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, 1990-2010



Jumlah dan Laju Pertumbuhan

Penduduk

Jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan, baik laki-laki maupun perempuan, dengan jumlah perempuan cenderung lebih banyak dibandingkan laki-laki. Pada 2010 jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta sekitar 3,46 juta jiwa, meningkat bila dibandingkan pada tahun 2000 yang sekitar 3,1 juta jiwa dengan *sex ratio* sebesar 98. Pada tahun 2012 jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta sekitar 3,51 juta.

Tabel 1.1 Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Per Tahun menurut Provinsi di Pulau Jawa dan Bali, 1990-2010

Table 1.1 Population Annual Growth Rate by Province in Java and Bali, 1990 – 2010

Provinsi/Province	1990-2000	2000-2010
(1)	(2)	(3)
DKI Jakarta	0,13	1,41
Jawa Barat	2,24	1,90
Jawa Tengah	0,94	0,37
D.I. Yogyakarta	0,72	1,04
Jawa Timur	0,70	0,76
Banten	-	2,78
Bali	1,31	2,15
Indonesia	1,40	1,49

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2011

Source: BPS, 2011 Statistical Yearbook of Indonesia

Bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Bali, untuk periode 2000-2010, laju pertumbuhan penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat di urutan ketiga terkecil setelah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu sebesar 1,04 persen. Sementara bila dibandingkan dengan angka pertumbuhan penduduk nasional, pada periode 2000-2010 Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat laju pertumbuhan penduduk yang lebih rendah.

Selama periode 1990-2000 dan 2000-2010 laju pertumbuhan penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta memperlihatkan tren naik (lihat tabel 1.1). Kenaikan laju pertumbuhan penduduk ini terjadi juga di

semua provinsi di Jawa-Bali, kecuali di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Kepadatan dan Persebaran Penduduk

Kepadatan penduduk menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah atau sering disebut sebagai kepadatan penduduk kasar (*crude population density*). Kepadatan penduduk merupakan salah satu indikator kependudukan yang umum digunakan karena mampu mencerminkan tingkat pemerataan penduduk dalam suatu wilayah. Tinggi rendahnya tingkat kepadatan penduduk dapat membawa dampak positif maupun negatif. Kepadatan yang sudah pada titik jenuh, mungkin akan lebih banyak memberi dampak negatif, akibat terjadinya ketimpangan sumber daya. Permasalahan sosial dan kriminal kemungkinan akan meningkat jika tidak segera dilakukan keseimbangan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti fasilitas sosial dan ekonomi.

Pemerataan dan keseimbangan dapat juga dilakukan dengan relokasi penduduk dalam bentuk migrasi sehingga terjadi kondisi ideal dan seimbang antara penduduk dan ketersediaan sumber daya.

Gejala umum yang terjadi adalah bahwa kepadatan penduduk cenderung tinggi

di daerah-daerah perkotaan. Ketersediaan fasilitas kehidupan yang lebih lengkap dan beragam serta bervariasinya lapangan pekerjaan merupakan daya tarik tersendiri yang menggiring penduduk untuk melakukan perpindahan ke pusat-pusat kota.

Penduduk yang tidak merata persebarannya perlu mendapat perhatian berkaitan dengan daya dukung lingkungan yang tidak seimbang antar kabupaten/kota. Oleh karena itu diharapkan adanya persebaran penduduk yang lebih merata dari wilayah yang padat penduduknya ke wilayah yang jarang penduduknya atau rendah tingkat kepadatannya.

Tabel 1.2 Kepadatan Penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta, 1990-2010, 2012
Tabell.2 Population Density in Daerah Istimewa Yogyakarta, 1990-2010, 2012

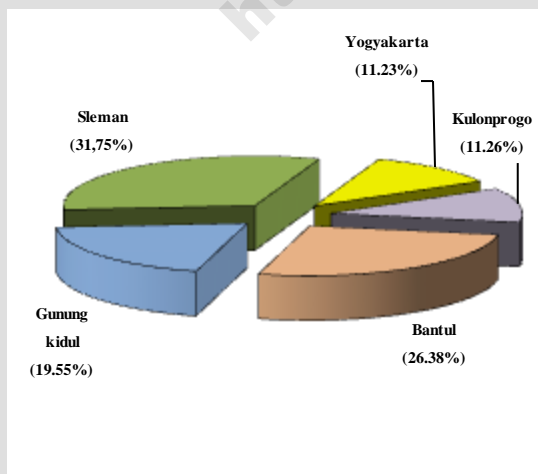
Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Kepadatan Penduduk/Km ² <i>Population Density</i>			
	1990	2000	2010	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kulonprogo	635	633	663	671
Bantul	1.357	1.541	1.798	1.831
Gunungkidul	438	451	455	461
Sleman	1.358	1.568	1.902	1.939
Yogyakarta	12.679	12.206	11.958	12.123

Sumber : BPS, Sensus Penduduk 1990-2010, Estimasi BPS
Source : BPS, 1990-2010 Population Census, BPS Estimation

Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta sebagian besar tinggal di Kabupaten Sleman. Gambar 1.2 menunjukkan bahwa persebaran penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta pada 2012 di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunungkidul, sekitar 20-30 persen. Sementara penduduk di Kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta hanya meliputi sekitar 11 persen.

Bila dilihat menurut tingkat kepadatannya, angka kepadatan tertinggi pada 2012 tercatat di Kota Yogyakarta, sebesar 12.123 jiwa per km², yang diikuti oleh Kabupaten Sleman dan Bantul. Pada tahun 2012 juga mencatat kepadatan penduduk terendah di Kabupaten Gunungkidul yaitu 461 jiwa per km².

Gambar 1.2. : Distribusi Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta menurut kabupaten/kota, tahun 2012



Angka Ketergantungan

Ukuran keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan dapat dilihat pula melalui perubahan komposisi penduduk menurut umur yang digambarkan dengan semakin rendahnya proporsi penduduk yang tidak produktif yaitu penduduk berumur muda (di bawah 15 tahun) dan lanjut usia (65 tahun keatas) dibandingkan penduduk yang produktif (15-64 tahun). Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Sementara penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi.

Dengan angka ketergantungan ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja.

Pada tahun 2012, rata-rata setiap 100 penduduk produktif menanggung sekitar 46 penduduk tidak produktif.

Tabel 1.3 mencatat bahwa pada 2012 Angka Beban Ketergantungan/*Dependency Ratio* di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 46. Artinya secara rata-rata setiap 100 penduduk produktif menanggung sekitar 46 penduduk tidak produktif atau setiap 1 orang usia tidak produktif akan ditanggung

oleh sekitar 2 orang usia produktif. Namun hal ini dengan asumsi bahwa setiap usia produktif betul-betul dapat produktif. Jika tidak, tentu akan lebih berat lagi karena beban tanggungan usia produktif yang juga harus menanggung usia produktif lainnya. Bahkan, usia produktif yang tidak dapat diberdayakan untuk betul-betul produktif secara ekonomi (pengangguran) akan menimbulkan masalah yang cukup serius dalam kehidupan sosial.

Tabel 1.3 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Tanggungan di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2012 (Persen)

Table 1.3 *Composition of Population and Dependency Ratio in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2009-2011 (Percent)*

Tahun Year	Umur /Age			Jumlah Total	Angka Beban Tanggungan Dependency Ratio
	0-14	15-64	65+		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2010	21,99	68,49	9,52	100,00	46
2011	22,26	68,47	9,27	100,00	46
2012	22,30	68,42	9,28	100,00	46

Sumber: BPS, Susenas 2011 & 2012, dan Sensus Penduduk 2010

Source : BPS, 2011, 2012 National Socio Economic Survey and 2010 Population Census

Status Perkawinan

Status perkawinan secara demografi merupakan faktor antara dalam penghitungan fertilitas, khususnya status perkawinan pada

penduduk perempuan. Selain itu, status perkawinan juga dapat mencerminkan kestabilan status penduduk dalam membentuk rumah tangga.

Tabel 1.4 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2012

Table 1.4 *Percentage of Population 10 Years Old and Over by Sex and Marital Status in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2012*

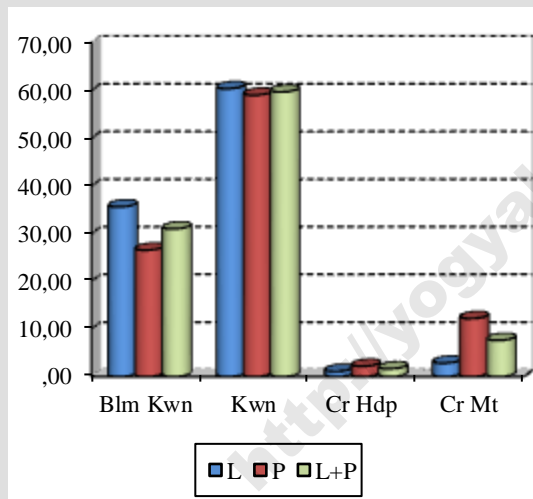
Jenis Kelamin/ Sex	Status Perkawinan / Marital Status				Jumlah / Total
	Belum kawin/ Single	Kawin/ Married	Cerai Hidup/ Divorce d	Cerai Mati/ Widowe d	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2010					
Laki-laki /Male	37,15	59,57	0,74	2,54	100,00
Perempuan/Female	28,18	58,79	2,04	10,99	100,00
Laki-laki+Perempuan. Male+Female	32,58	59,17	1,40	6,84	100,00
2011					
Laki-laki/Male	35,09	61,17	1,08	2,66	100,00
Perempuan/Female	28,22	57,42	2,73	11,63	100,00
Laki-laki+Perempuan. Male+Female	31,53	59,22	1,94	7,32	100,00
2012					
Laki-laki/Male	35,62	60,42	1,11	2,85	100,00
Perempuan/Female	26,55	59,04	2,20	12,21	100,00
Laki-laki+Perempuan. Male+Female	31,00	59,71	1,67	7,62	100,00

Sumber : BPS, Susenas 2011 & 2012, dan Sensus Penduduk 2010

Source : BPS, 2011, 2012 National Socio Economic Survey, and 2010 Population Census

Untuk melihat stabil tidaknya ketahanan rumah tangga, dapat dicermati dari status cerai hidup. Makin tinggi status cerai hidup, maka kualitas ketahanan rumah tangga relatif makin rendah. Dibanding 2011, di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012 terdapat 1,67 persen penduduk usia 10 tahun keatas berstatus cerai hidup yang sebelumnya mencapai 1,94 persen atau turun sekitar 0,27 poin (lihat tabel 1.4).

Gambar 1.3. : Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012



Jika dilihat pada status cerai hidup/mati, penduduk perempuan dengan status ini selalu lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki, seperti terlihat dari data 3 tahun terakhir (2010-2012). Hal ini mencerminkan bahwa perempuan lebih dapat bertahan dengan status jandanya (janda cerai

mati) dibanding laki-laki. Ketika laki-laki ditinggal mati oleh pasangannya, kemungkinan untuk menikah lagi akan lebih besar, dan mungkin ini juga yang menyebabkan lebih tingginya persentase laki-laki dengan status kawin dibanding perempuan. Di samping itu juga bisa disebabkan harapan hidup perempuan yang lebih panjang daripada laki-laki.

Usia Perkawinan Pertama

Usia perkawinan pertama wanita sangat mempengaruhi tingkat fertilitas dan perkembangan jumlah penduduk. Makin muda usia perkawinan memberi peluang untuk memperpanjang masa reproduksi dan hal ini akan menjadikan tingkat kelahiran semakin tinggi. Semakin tinggi usia perkawinan pertama akan mempersingkat masa reproduksi wanita dan itu berarti peluang tingkat kelahiran akan rendah.

Usia perkawinan pertama yang terlalu muda maupun terlalu tua akan memberi resiko tinggi bagi wanita itu sendiri. Kondisi fisik ketika mengandung dan melahirkan yang tidak ideal berakibat buruk bagi ibu dan anak yang dilahirkan. Usia perkawinan pertama bagi wanita yang dianjurkan menurut kesehatan yaitu antara 20-30 tahun.

Berdasarkan hasil Susenas seperti pada tabel 1.5 terlihat bahwa pada tahun 2012 persentase wanita pernah kawin yang usia perkawinan pertamanya kurang atau sama dengan 16 tahun cenderung mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011. Pada tahun 2012 tercatat sebanyak 7,95 persen wanita pernah kawin yang usia perkawinan pertamanya kurang atau sama dengan 16 tahun. Hal ini berarti bahwa selama periode 2011-2012 menunjukkan kecenderungan wanita untuk mempercepat perkawinannya.

peningkatan pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2011. Untuk usia perkawinan pertama pada kelompok usia 25 tahun keatas mengalami penurunan menjadi 20,01 persen pada 2012, dari sebelumnya 21,39 persen pada tahun 2011.

Dengan memberi kesempatan pada wanita untuk bersekolah lebih tinggi dan memperluas kesempatan kerja, diharapkan dapat membantu menunda usia perkawinan pertama bagi seorang wanita dan pada akhirnya dapat menekan tingkat kelahiran.

Tabel 1.5 Persentase Wanita Pernah Kawin Usia 10 Tahun Ke atas menurut Umur Perkawinan Pertama di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010 – 2012

Table 1.5 Percentage of Ever Marriage Women Aged 10 Years and Above by Age at First Married in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010 – 2012

Tahun Year	Umur Perkawinan Pertama/ Age at First Married				Jumlah Total
	≤16	17-18	19-24	25 +	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2010	10,81	18,36	50,01	20,82	100,00
2011	7,24	18,46	52,90	21,39	100,00
2012	7,95	18,20	53,84	20,01	100,00

Sumber : BPS, Susenas 2010- 2012

Source : BPS, 2010-2012 National Socio Economic Survey

Persentase wanita pernah kawin dengan usia perkawinan pertama usia 17-18 tahun mengalami penurunan sekitar 0,23 poin, sedangkan usia 19-24 tahun mengalami

Kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Dengan kondisi fisik yang sehat maka manusia dapat melakukan aktivitas secara optimal. Oleh sebab itu kesehatan menjadi salah satu aspek kesejahteraan dan menjadi salah satu fokus utama pembangunan manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah sudah menggalakkan berbagai program untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang sasaran utamanya meningkatkan angka harapan hidup, menurunkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu serta menurunkan prevalensi gizi kurang.

Pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan selama ini dianggap telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara cukup bermakna, walaupun masih banyak dijumpai berbagai masalah dan hambatan. Pada kurun waktu 2010-2014 penekanan pembangunan kesehatan diprioritaskan pada pencapaian sasaran nasional, standar pelayanan minimal (SPM), dan *Millenium Development Goals (MDGs)*. Target yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan tersebut adalah masyarakat, bangsa dan negara yang ditandai

oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga tercapai visi pembangunan kesehatan yaitu Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan.

Upaya yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; penyediaan sumber daya kesehatan yang kompeten; peningkatan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, posyandu, dan rumah sakit; penyediaan obat yang terjangkau oleh masyarakat, dan pendistribusian tenaga kesehatan secara merata.

Banyak indikator yang digunakan untuk melihat derajat kesehatan penduduk. Beberapa indikator utama yang sering digunakan antara lain Angka Kematian Bayi (AKB, *Infant Mortality Rate, IMR*) dan Angka Harapan Hidup (AHH, *Expectation of*

Life at Birth). Beberapa indikator juga dapat dijadikan tolok ukur dalam melihat kondisi kesehatan masyarakat seperti kondisi persalinan, pola pemberian asi, imunisasi, pemanfaatan fasilitas kesehatan dan angka kesakitan (*morbidity rate*).

Derajat Kesehatan Masyarakat.

Dari tahun ke tahun derajat kesehatan penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan menurunnya angka kematian bayi dan meningkatnya angka harapan hidup.

Angka kematian bayi di Daerah Istimewa Yogyakarta selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi. Berdasarkan Sensus Penduduk 2010 angka kematian bayi sebesar 15,7 per 1000 kelahiran hidup, pada tahun 2011 menjadi 18,1 per 1000 kelahiran hidup sedangkan pada tahun 2012 mengalami sedikit penurunan menjadi 18,0 per 1000 kelahiran hidup.

Sebaliknya angka harapan hidup penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010 sebesar 73,27 mengalami sedikit penurunan menjadi 73,22 pada tahun 2011 dan menjadi 73,27 tahun pada tahun 2012. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak yang lahir pada tahun 2012 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai umur 73,27 tahun.

Tabel 2.1 Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta,

Table 2.1 Trends Infant Mortality Rates and Life Expectancy in Daerah Istimewa Yogyakarta

Indikator Derajat Kesehatan/ <i>Health Indicators</i>	Tahun/ <i>Year</i>		
	SP 2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Kematian Bayi/ <i>Infant Mortality Rate</i>	15,7	18,1	18,0
Angka Harapan Hidup/ <i>Life Expectancy</i>	73,27	73,22	73,27

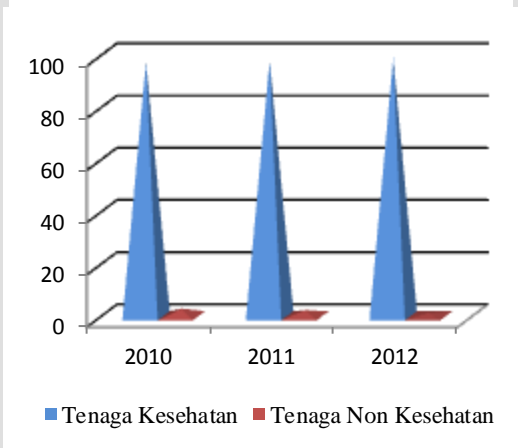
Sumber: BPS, DIY Dalam Angka 2010-2012 BPS Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta

Source : BPS, DIY in Figures, 2010-2012 BPS – Statistics of Daerah Istimewa Yogyakarta Province

Secara umum dapat disimpulkan adanya kenaikan kualitas fisik atau kualitas kesehatan penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan tahun rujukan 2012 yang ditandai dengan menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) dan meningkatnya Angka Harapan Hidup. Dimensi AKB di antaranya adalah kesehatan ibu semasa hamil hingga masa nifas dan kesehatan lingkungan tempat tinggal. Termasuk di dalamnya faktor penolong kelahiran.

Penolong Persalinan

Gambar 2.1: Persentase Balita menurut Penolong Kelahiran Pertama, 2010 – 2012



Kesehatan balita tidak hanya dipengaruhi oleh kesehatan ibu semasa kehamilan. Kesehatan balita juga dipengaruhi pula oleh faktor lain, seperti proses kelahiran/persalinan serta kondisi lingkungan tempat tinggal.

Data penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan, terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum.

Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, seperti dokter atau bidan, dianggap lebih baik dibandingkan dengan proses yang ditolong dukun atau lainnya. Besaran ini dapat menggambarkan tingkat kemajuan pelayanan kesehatan terutama pada saat kelahiran.

Tabel 2.2 menunjukkan persentase penolong kelahiran balita pertama, sedangkan tabel 2.3 penolong kelahiran balita yang terakhir.

Tabel 2.2 Persentase Balita menurut Penolong Kelahiran Pertama di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2012

Table 2.2 Percentage of Children Under Fives by First Birth Attendant in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2012

Tahun/ Year	Penolong Kelahiran /Birth Attendant				
	Dokter/ Doctor	Bidan/ Midwife	Tenaga Medis lain/ Others Medical Personnel	Dukun/ Tradition al Birth Attendant	Lainnya /Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2010	36,97	59,24	1,01	2,29	0,49
2011	37,25	60,56	0,00	0,68	1,51
2012	35,00	60,99	0,54	0,90	2,57

Sumber : BPS, Susenas 2010- 2012

Source : BPS, 2010-2012 National Socio Economic Survey

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan tabel 2.2 sebagian besar proses persalinan ditolong oleh bidan, kemudian oleh dokter. Pada 2012 persentase persalinan pertama yang ditolong oleh tenaga kesehatan mencapai 96,53 persen dari jumlah seluruh persalinan. Sedangkan persalinan yang ditolong dengan tenaga non kesehatan (dukun dan lainnya) sekitar 3,47 persen.

Demikian pula berdasarkan tabel 2.3, pada umumnya proses persalinan terakhir juga banyak ditolong oleh tenaga kesehatan.

Pada 2012 persentase persalinan terakhir yang ditolong tenaga kesehatan mencakup 98,79 persen dari jumlah seluruh persalinan. Lebih lanjut, proses persalinan oleh tenaga non kesehatan (dukun dan lainnya) hanya sekitar 1,21 persen.

Tabel 2.3 Persentase balita menurut Penolong Kelahiran Terakhir di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2012

Table 2.3 Percentage of Children Under Fives by First Birth Attendant in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2012

Tahun/ Year	Penolong Kelahiran/Birth Attendant				
	Dokter/ Doctor	Bidan/ Midwife	Tenaga Medis lain/ Others Medical Person nel	Dukun/ Traditio nal Birth Attenda nt	Lainnya / Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2010	39,34	56,73	1,97	1,89	0,07
2011	40,58	58,50	0,24	0,68	0,00
2012	38,78	59,69	0,32	0,79	0,42

Sumber : BPS, Susenas 2010- 2012

Source : BPS, 2010- 2012 National Socio Economic Survey

Apabila dikaitkan penolong kelahiran pertama dan terakhir (tabel 2.2 dan tabel 2.3) terlihat bahwa persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan secara umum cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menggambarkan tingkat kemajuan pelayanan kesehatan terutama saat kelahiran dimana resiko kematian amat tinggi.

Pada tahun 2011, persentase penolong kelahiran pertama oleh tenaga kesehatan mencapai 97,81 persen, sementara pada tahun 2012 turun menjadi 96,53 persen. Begitu pula persentase penolong kelahiran terakhir oleh tenaga kesehatan pada tahun 2011 mencapai 99,32 persen dan pada tahun 2012 turun menjadi 98,79 persen. Penurunan angka penolong kelahiran ini disebabkan oleh penurunan peranan tenaga medis yaitu dokter, yang peranannya cenderung bergeser kepada bidan.

Peningkatan derajat dan status kesehatan ini tidak terlepas dari ketersediaan dan keterjangkauan sarana dan prasarana kesehatan seperti fasilitas tempat berobat dan tenaga kesehatan yang tersedia. Pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses terhadap tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya.

Air Susu Ibu

Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan yang paling penting bagi pertumbuhan dan kesehatan bayi, karena selain mengandung nilai gizi yang tinggi juga mengandung zat pembentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit. Manfaat lain yang diperoleh dari pemberian ASI diantaranya dapat menumbuhkan ikatan batin dan kasih sayang antara ibu dan anak. Makin lama

pemberian ASI cenderung akan membuat daya tahan tubuh anak balitanya semakin baik.

Tabel 2.4 Persentase Balita Usia 2-4 tahun menurut lamanya disusui di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010 – 2012

Table 2.4 Percentage of Children Under Fives (2-4 years) by Duration of Breast Feeding (Month) in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2012

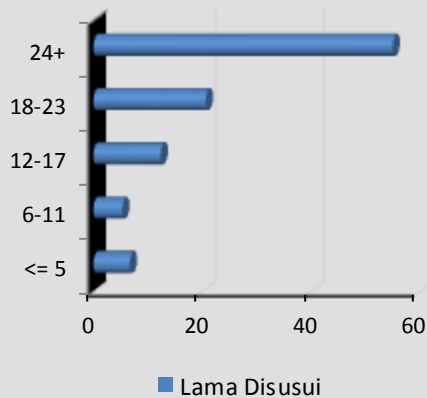
Tahun/ Year	Lamanya Disusui (bulan) / Duration of Breast Feeding (month)				
	≤5	6-11	12-17	18-23	24 ⁺
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2010	6,59	5,91	12,08	19,76	55,66
2011	4,93	5,86	11,91	20,51	56,78
2012	6,67	5,29	12,35	20,64	55,05

Sumber : BPS, Susenas , 2010-2012

Source : BPS, 2010-2012 National Socio Economic Survey

Tabel 2.4 menunjukkan distribusi balita berumur 2-4 tahun menurut lamanya disusui yang terbagi dalam 5 kelompok.

Gambar 2.2: Persentase balita usia 2-4 tahun menurut lamanya disusui, 2012



Rata-rata lama pemberian ASI balita di Daerah Istimewa Yogyakarta cukup tinggi. Pada tahun 2012, dari populasi balita berusia 2-4 tahun yang disusui lebih dari 24 bulan persentasenya sedikit mengalami penurunan dibanding tahun 2011, yaitu menjadi sebanyak 55,05 persen. Sementara yang disusui kurang dari atau sama dengan 5 bulan jumlahnya mengalami peningkatan menjadi 6,67 persen.

Imunisasi

Disamping pemberian ASI, imunisasi juga sangat berperan dalam membentuk ketahanan tubuh anak dari serangan penyakit. Semakin lengkap imunisasi yang diberikan maka semakin kecil peluang balita untuk terserang penyakit. Ada banyak macam jenis imunisasi yang dapat diberikan pada anak balita, namun dalam Susenas 2012 yang dicakup adalah imunisasi BCG, DPT, Polio, Campak dan Hepatitis B.

Pada 2012, hampir seluruh (95 persen lebih) balita di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mendapat imunisasi BCG, DPT, Polio dan Hepatitis B. Namun untuk vaksin Campak baru mencapai sekitar 81,18 persen balita. Hal ini mungkin berkaitan dengan sosialisasi untuk vaksin campak masih belum segenyar vaksin lainnya.

Tabel 2.5 Persentase Balita yang Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Imunisasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2012

Table 2.5 Percentage of Children Under 5 Years had vaccinated by Sex and Vaccines in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2012

Jenis Kelamin/ Sex	Jenis Imunisasi / Vaccines				
	BCG	DPT	Polio	Campak	Hepatitis B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2010 Laki-laki/Male	97,10	92,51	93,52	80,92	93,99
Perempuan/ Female	98,18	94,45	94,39	83,90	95,69
Laki- laki+Perempuan/ Male+Female	97,62	93,45	93,94	82,36	94,81
2011 Laki-laki/Male	98,60	94,78	93,99	85,17	94,50
Perempuan/ Female	99,58	96,60	96,24	87,22	96,76
Laki-laki+ Perempuan/ .Male/Female	99,08	95,67	95,08	86,17	95,60
2012 Laki-laki/Male	99,05	96,76	96,10	82,66	96,26
Perempuan/ Female	99,26	96,35	96,32	79,68	95,44
Laki-laki+ Perempuan/ .Male/Female	99,16	96,56	96,21	81,18	95,85

Sumber : BPS, Susenas 2010- 2012

Source : BPS, 2010-2012 National Socio Economic Survey

Walaupun demikian, angka ini termasuk dalam kategori imunisasi dengan cakupan baik (di atas 80 persen).

Tabel 2.5 juga memberi gambaran bahwa antara balita laki-laki maupun balita perempuan tidak terjadi pola khusus dalam pemberian imunisasinya. Perlakuan yang tidak membedakan jenis kelamin balita menunjukkan bahwa selama tahun 2010-2012, dalam hal imunisasi tidak terjadi bias gender.

Keluhan Kesehatan

Derajat kesehatan penduduk juga dapat dilihat dari angka *morbidity* (kesakitan) yang menunjukkan ada tidaknya keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Keluhan dimaksud mengindikasikan adanya suatu penyakit tertentu.

Morbidity atau angka kesakitan adalah proporsi penduduk yang mengeluh sakit pada selang waktu tertentu. Dalam Susenas yang dilaksanakan oleh BPS, keluhan kesehatan yang dimaksud mencakup: panas, batuk, pilek, asma/sesak nafas, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, telinga berair/congek, dan lain-lain. Referensi yang digunakan dalam Susenas adalah sebulan sebelum pencacahan. Semakin tinggi angka morbiditas maka menunjukkan semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan.

Tabel 2.6 menunjukkan besarnya persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan. Dua jenis keluhan kesehatan yang paling banyak dialami penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta selama 2012 meliputi batuk (17,26 persen) dan pilek (15,95 persen).

Tabel 2.6 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan yang Lalu di D.I Yogyakarta 2010-2012

Table 2.6 *Percentage of Population Who Had Health Complaint During the Previous Month in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2012*

Keluhan Kesehatan/ Health Complaint	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
Panas / Fever	25,82	25,42	8,51
Batuk / Cough	49,34	49,76	17,26
Pilek / Flu	46,47	47,18	15,95
Asma, Sesak Nafas /Asthma, Breatless	3,76	3,05	1,20
Diare, Buang-buang Air/ Diarrhea and Vomiting	3,33	3,60	1,15
Sakit Kepala / Headache	14,14	12,93	4,56
Sakit Gigi / Toothache	4,00	3,52	1,73
Lainnya / Others Complaint	36,31	38,23	13,88

Sumber : BPS, Susenas 2010-2012

Source : BPS, 2010-2012 National Socio Economic Survey

Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Untuk meningkatkan kualitas kesehatan penduduk, pemerintah telah berupaya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang disertai dengan distribusi tenaga kesehatan yang memadai, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas.

Dalam mengatasi masalah kesehatan, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah dengan membangun atau memperbaiki fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan harus representatif, murah dan aksesnya mudah dijangkau sehingga masyarakat dapat menggunakannya dengan optimal.

Penduduk yang mengalami gangguan kesehatan pada umumnya melakukan upaya pengobatan, baik dengan berobat sendiri maupun berobat jalan.

Tabel 2.7 Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010 – 2012

Table 2.7 *Number of Health Facilities in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010 – 2012*

Fasilitas Kesehatan/ Health Facilities	Tahun/Year		
	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah Sakit/ General Hospital	63	63	66
Rumah Bersalin/ Childbirth House	71	70	70
Balai Pengobatan/ Polyclinic	181	181	181
Puskesmas/ Public Health Centre	558	576	576
Apotik/ Dispensaries	428	455	464
Toko Obat Berijin/ Lisence of Drugstore	57	51	51

Sumber: BPS, DIY Dalam Angka 2010-2012

Source : BPS, DIY in Figures, 2010-2012

Bagi penduduk yang berobat jalan, jenis fasilitas kesehatan yang paling banyak dikunjungi pada 2012 adalah Praktek Dokter (35,93 persen) dan Puskesmas (28,90 persen). Hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya (2010 dan 2011), di mana penduduk lebih banyak memilih berobat ke praktek dokter dan Puskesmas. Pada tahun 2012 terjadi sedikit kenaikan pada praktek pengobatan tradisional (Batra) menjadi 1,68 persen.

Tabel 2.8 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2012

Table 2.8 *Percentage of Population Treated Outpatient by Place/Method of Medical in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2012*

Tempat Berobat/	Tahun/Year		
	2010	2011	2012
(1)	(3)	(4)	(5)
Rumah Sakit/Hospital	15,44	16,81	16,82
Praktek Dokter/Medical Doctor	35,54	34,88	35,93
Puskesmas/Health Centre	33,92	32,32	28,90
Praktek Batra/Medical Traditional	1,01	1,40	1,68
Petugas Kesehatan/Paramedical	16,86	19,28	21,17
Lainnya/Others	0,09	1,84	1,85

Sumber : Susenas 2010-2012

Source : 2010-2012 *National Socio Economic Survey*

Hal ini kemungkinan disebabkan karena semakin mahal biaya pengobatan praktek dokter swasta sehingga memaksa mereka untuk beralih ke tempat pengobatan yang lebih murah yaitu Puskesmas dan Batra. Selain itu akses ke Puskesmas dan Batra lebih mudah dijangkau terutama oleh penduduk yang berada di pelosok pedesaan.

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, gender dan lokasi geografis.

Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus merupakan investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan. Pemerataan, akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya.

Dalam beberapa tahun mendatang pembangunan pendidikan nasional di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan serius, terutama dalam upaya meningkatkan kinerja yang mencakup (a) pemerataan dan perluasan akses; (b)

peningkatan mutu, relevansi dan daya saing; (c) penataan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik; dan (d) peningkatan pembiayaan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 disebutkan dalam sasaran pembangunan bidang pendidikan ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan, yang antara lain ditandai oleh menurunnya jumlah penduduk buta huruf; meningkatnya persentase penduduk yang dapat menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun dan pendidikan lanjutan serta berkembangnya pendidikan kejuruan yang ditandai oleh meningkatnya jumlah tenaga terampil.

Beberapa indikator output yang dapat menunjukkan kualitas pendidikan SDM antara lain Angka Melek Huruf (AMH), Tingkat Pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Sedangkan beberapa indikator input pendidikan salah satunya adalah fasilitas pendidikan.

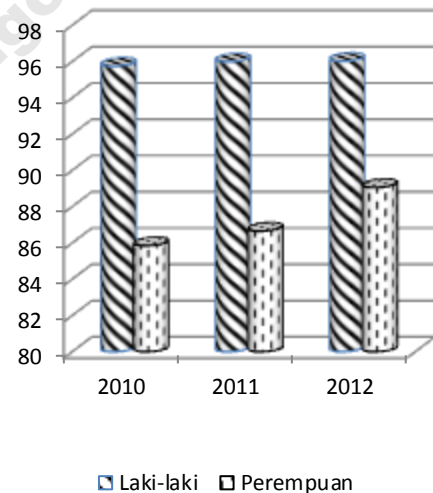
Angka Melek Huruf (AMH)

Kegiatan membaca merupakan proses awal memasuki dunia pengetahuan yang begitu luas menuju masyarakat maju. Membaca akan mempermudah seseorang untuk memahami informasi terkait bidang kerja dan berbagai aspek yang menyangkut peningkatan kualitas hidup. Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang untuk dapat mencapai tujuan hidupnya, dimana hal ini berkaitan langsung dengan bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Salah satu indikator mendasar yang digunakan untuk melihat tingkat kemampuan membaca dan menulis digunakan angka melek huruf (*Literacy Rate*). Kata melek huruf dapat diartikan sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis huruf latin/lainnya pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain atau dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat yang mampu baca tulis (BPS, 2011). Angka Melek Huruf (AMH) adalah tolok ukur penting dalam mempertimbangkan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. AMH merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan bidang pendidikan.

Dalam Susenas, kemampuan baca tulis dibedakan menjadi huruf latin dan lainnya. Dalam masyarakat Indonesia, huruf latin masih merupakan satu-satunya huruf yang dominan digunakan, sehingga dalam uraian ini dititik beratkan pada kemampuan baca tulis huruf latin.

Gambar 3.1: Angka Melek Huruf menurut jenis kelamin di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2012



Tabel 3.1 Angka Melek Huruf Latin menurut Jenis Kelamin di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010 - 2012

Table 3.1 Latin Literacy Rate by Sex in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010 – 2012

Jenis Kelamin/Sex	2010	2011	2012
(1)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki/Male	95,74	95,98	95,65
Perempuan/Female	85,84	86,65	88,05
L+P/Male/Female	90,66	91,12	91,76

Sumber: BPS, Susenas 2010- 2012

Source : BPS, 2010-2012 National Socio Economic Survey

Penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan masyarakat dewasa yang sudah seharusnya dapat membaca dan menulis huruf latin. Namun pada kenyataannya pada 2012 masih ada sekitar 8,24 persen penduduk usia 15 tahun ke atas tidak dapat membaca dan atau menulis huruf latin. Ini berarti angka melek hurufnya adalah sebesar 91,76 persen, artinya dari setiap 100 penduduk usia 15 tahun ke atas sekitar 92 orang yang mampu membaca dan menulis huruf latin. Sedangkan 8,24 persen angka buta huruf, artinya dalam 100 orang penduduk usia 15 tahun ke atas terdapat sekitar 8 orang yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin. Umumnya angka melek huruf penduduk laki-laki relatif lebih

tinggi dibanding perempuan.

Dibandingkan 2011, AMH penduduk usia 15 tahun ke atas pada 2012 relatif mengalami sedikit kenaikan baik pada penduduk perempuan. Berdasarkan data Susenas 3 tahun terakhir (2010–2012), AMH perempuan selalu lebih rendah dibanding AMH laki-laki.

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Daya saing suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dari kualitas SDM nya yang merupakan modal dasar pembangunan bangsa.

Makin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan tentunya makin tinggi kualitas SDM nya. Artinya, peluang negara untuk mendapatkan kontribusi positif dari pendidikan bagi pembangunan juga akan semakin tinggi karena makin besarnya modal yang dimiliki penduduk untuk bersaing dalam konstelasi tenaga kerja. Meskipun ijazah yang dimiliki terkadang bukan menjadi jaminan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Pada Tabel 3.2 dapat dilihat banyaknya penduduk usia 15 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin.

Dari hasil Susenas nampak bahwa tingkat pendidikan penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya berpendidikan SLTA ke atas. Dari Tabel 3.2 terlihat bahwa pada tahun 2011 maupun 2012, penduduk yang berpendidikan SLTA ke atas sudah di atas 40 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin persentase laki-laki yang berpendidikan SLTA ke atas lebih banyak daripada perempuan.

Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang berpendidikan SLTA keatas pada 2012 mengalami kenaikan dibanding 2011, yaitu dari 44,24 persen menjadi 44,54 persen. Hal ini terlihat pula bila dilihat menurut jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan mengalami kenaikan. Sebaliknya penduduk yang berpendidikan tidak/belum pernah sekolah maupun yang tidak/belum tamat SD mengalami penurunan. Sedangkan penduduk yang berijasah SD dan SLTP mengalami kenaikan. Fenomena ini kemungkinan disebabkan semakin tingginya angka partisipasi sekolah pada tingkat SD dan SLTP di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta mayoritas berpendidikan SLTA keatas, baik laki-laki maupun perempuan

Tabel 3.2 Persentase Penduduk 15 tahun ke atas menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2011 dan 2012

Table 3.2 Percentage of Population Aged 15 Years and Above by Educational Attainment and Sex in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2011 and 2012

Tingkat Pendidikan/ <i>Education Attainment</i>	Laki-laki/		Perempuan/		L + P / <i>M + F</i>	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak/belum pernah sekolah/ <i>Not Yet Attending School</i>	3,13	3,36	11,40	10,68	7,44	7,11
Tidak/ belum tamat SD/ <i>Not Completed PS</i>	9,49	8,21	10,85	10,30	10,20	9,28
SD/ <i>Primary School</i>	18,24	17,77	16,98	18,31	17,59	18,05
SLTP/ <i>Junior High School</i>	21,21	22,28	19,93	19,82	20,54	21,02
SLTA ke atas/ <i>Senior High School and Above</i>	47,93	48,38	40,84	40,89	44,24	44,54

Sumber: BPS, Susenas 2011 - 2012

Source: BPS, 2011- 2012, *National Socio Economic Survey*

Angka Partisipasi Sekolah

Salah satu tujuan MDGs adalah menjamin bahwa sampai dengan tahun 2015 semua anak, dimanapun, baik laki-laki maupun perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar (*primary schooling*). APS merupakan salah satu indikator yang dapat

digunakan untuk menilai pencapaian MDGs, yaitu digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah menurut Jenis Kelamin dan Usia Sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012
Table 3.3 School Participation Ratio by Sex and Age Groups in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012

Kelompok Umur/ Age group	Laki-laki/ Male	Perempuan/ Female	L + P / M + F
(1)	(2)	(3)	(4)
7-12	99,69	99,85	99,77
13-15	98,12	98,53	98,32
16-18	81,33	79,10	80,22

Sumber: BPS, Susenas 2012
Source: BPS, 2012, National Socio Economic Survey

Dari Tabel 3.3 menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) tertinggi terdapat pada kelompok usia 7-12 tahun, yaitu sebesar 99,77 persen. Hal ini berarti masih ada sekitar 0,23 persen penduduk berusia 7-12 tahun yang tidak bersekolah. Dari tabel tersebut juga terlihat bahwa APS

penduduk perempuan dan penduduk laki-laki pada kelompok umur 7-12 dan 13-15 tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Sedangkan pada kelompok umur 16-18 APS perempuan lebih rendah dibandingkan APS laki-laki.

Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia pendidikan tersebut.

APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Nilai APK suatu jenjang pendidikan bisa lebih dari 100 persen karena masih terdapat siswa yang berusia di luar batasan usia sekolah baik yang lebih tua maupun yang lebih muda.

Tabel 3.4 Angka Partisipasi Kasar menurut Jenis Kelamin dan Usia Sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012

Table 3.4 Gross Enrollment Ratio by Sex and Age Groups in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012

Tingkat Pendidikan/ Education Attainment	Laki-laki/ Male	Perempuan / Female	L + P / M + F
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/Primary School	108,69	105,43	107,13
SLTP/Junior High School	84,89	93,26	88,99
SLTA /Senior High School	86,90	79,23	83,09

Sumber: BPS, Susenas 2012

Source: BPS, 2012, National Socio Economic Survey

Berdasarkan Tabel di atas, pada 2012 APK di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tingkat pendidikan SD diatas 100 persen yaitu mencapai 107,13 persen. Ini berarti yang bersekolah di SD tidak hanya usia pendidikan SD (7-12 tahun) tapi juga usia di atas 12 tahun atau dibawah 7 tahun masih/sudah ada yang duduk di tingkat SD. Tapi ini tidak berarti bahwa usia 7-12 tahun sudah semua bersekolah, karena APK tidak dapat mencerminkan besaran anak usia 7-12 tahun yang belum pernah bersekolah.

Semakin tinggi tingkat pendidikan, APK laki-laki maupun perempuan semakin kecil persentasenya. Hal ini bisa diartikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan semakin banyak anak yang berhenti dan

tidak melanjutkan pendidikan dengan berbagai alasan.

Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan

Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Tabel 3.5 Angka Partisipasi Murni menurut Jenis Kelamin dan Usia Sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012

Table 3.5 Net Enrollment Ratio by Sex and Age Groups in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012

Tingkat Pendidikan/ Education Attainment	Laki-laki/ Male	Perempuan/ Female	L + P / M + F
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/Primary School	97,06	94,91	96,03
SLTP/Junior High School	70,88	74,48	72,64
SLTA /Senior High School	67,60	60,39	64,02

Sumber: Susenas 2012

Source: 2012, National Socio Economic Survey

Pada 2012, di Daerah Istimewa Yogyakarta, APM SD menunjukkan angka 96,03 persen yang berarti ada sekitar 96,03 persen anak usia SD (7-12 tahun) yang bersekolah di SD, sementara 3,97 persennya lagi mungkin sudah bersekolah di tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau mungkin juga belum bersekolah. Perlu penelusuran lebih jauh lagi dari 3,97 persen anak usia 7-12 berapa yang betul-betul belum bersekolah, dan sejumlah ini yang menjadi sasaran dinas teknis untuk mendorong mereka masuk ke bangku sekolah SD/ sederajat.

Pada jenjang pendidikan SD dan SLTA, APM laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Sedangkan pada jenjang

pendidikan SLTP APM perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki.

Kebutuhan guru terhadap murid dan daya dukung kelas terhadap murid dari tahun ketahun masih cukup memadai

Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan sebagai salah satu indikator input merupakan kekuatan awal dalam membangun kualitas SDM di bidang pendidikan. Ketersediaan sarana dan prasarana sangat mempengaruhi proses belajar yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi output pendidikan. Ketersediaan guru atau kelas yang ideal untuk menangani sejumlah siswa tentu akan memacu kualitas keluaran yang maksimal. Sebaliknya, ketersediaan yang tidak mencukupi akan memberikan kualitas hasil didik yang mungkin dibawah standar.

Indikator untuk mengukur pemerataan dan perluasan akses pendidikan adalah rasio sekolah yang mencakup rasio murid guru dan rasio murid kelas. Fasilitas yang mencukupi akan mendorong peningkatan APS maupun APM.

Tabel 3.6 menggambarkan beban kerja guru serta kepadatan kelas pada suatu jenjang pendidikan. Rasio murid-guru pada jenjang pendidikan SD, SLTP, maupun

SLTA, masih memenuhi persyaratan bagi seorang guru untuk bisa mengawasi dan memberi perhatian kepada murid sehingga mutu pengajaran tetap berjalan dengan baik.

Pada 2012/2013 rasio murid-guru SD, SLTP, dan SLTA masing-masing 13, 11, dan 9, serta rata-rata jumlah murid di tiap jenjang pendidikan sebesar 21, 29, dan 29 murid per kelas.

Tabel 3.6 Perkembangan Rasio Murid-Guru dan Rasio Murid-Kelas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2011/2012 dan 2012/2013

Table 3.6 Trends in Pupil-Teacher Ratio and Pupil-Classroom Ratio in D.I. Yogyakarta, 2011/2012 and 2012/2013

Rasio/Ratio Tahun/Years	Jenjang Pendidikan/ Education Attainment		
	SD	SLTP	SLTA
(1)	(2)	(3)	(4)
Murid-Guru/ Pupil-Teacher			
2011/2012	13	11	9
2012/2013	13	11	9
Murid-Kelas/Pupil-Classroom			
2011/2012	18	28	28
2012/2013	21	29	29

Sumber: Dinas Pendidikan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

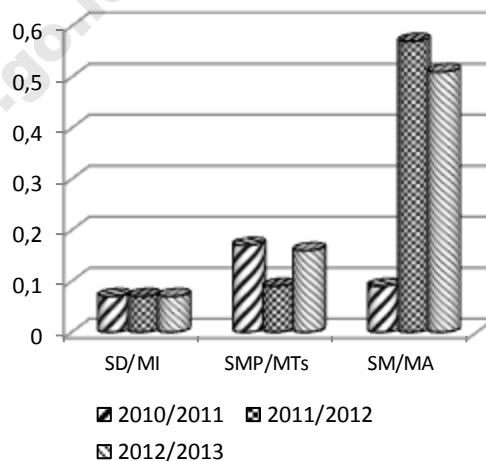
Source: Education Services, Daerah Istimewa Yogyakarta Province

Putus Sekolah

Angka putus sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi dan tidak menamatkan suatu

jenjang pendidikan tertentu. Angka ini sering digunakan sebagai indikator berhasil/tidaknya pembangunan di bidang pendidikan. Indikator ini digunakan sebagai barometer pencapaian rencana strategis dalam rangka peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan.

Gambar 3.2: Angka Putus Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010/2011-



Tingginya angka putus sekolah menunjukkan kesadaran dan atau kemampuan untuk akses pada pendidikan masih relatif rendah. Penyebab utama putus sekolah antara lain karena kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak, keterbatasan ekonomi, keadaan geografis yang kurang menguntungkan, keterbatasan akses menuju ke sekolah, karena sekolah jauh atau minimnya fasilitas pendidikan.

Tabel 3.7 Perkembangan Angka Putus Sekolah menurut Tingkat Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010/2011–2012/2013

Table 3.7 Trends of Drop-Out Rate by Level of Education in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010/2011– 2012/2013

Tahun/ Year	SD/MI PS	SMP/MTs JHS	SM/MA SHS
(1)	(2)	(3)	(4)
2010/2011	0,07	0,17	0,44
2011/2012	0,07	0,09	0,57
2012/2013	0,07	0,16	0,51

Sumber: Dinas Pendidikan, Daerah Istimewa Yogyakarta

Source: *Education Services, Daerah Istimewa Yogyakarta*

Tabel 3.7 menunjukkan angka putus sekolah selama periode 2010/2011–2012/2013 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Angka putus sekolah selama tiga tahun menunjukkan tren penurunan kecuali pada jenjang SMP/MTs. Angka putus sekolah pada jenjang SD/MI tetap stabil tercatat 0,07 persen pada tahun ajaran 2010/2011–2012/2013. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs, angka putus sekolah mengalami peningkatan 0,09 persen pada tahun ajaran 2011/2012 menjadi 0,16 persen pada 2012/2013. Sedangkan angka putus sekolah pada jenjang SM/MA mengalami penurunan dari 0,57 persen pada tahun ajaran 2011/2012 menjadi 0,51 pada tahun ajaran 2012/2013.

Bab 4

Angkatan Kerja **Labour Force**

Besarnya angkatan kerja mencerminkan besarnya penawaran tenaga kerja. Sayangnya besarnya penawaran tersebut kurang disertai dengan besarnya permintaan terhadap tenaga kerja, sehingga sebagian angkatan kerja tidak terserap dalam pasar tenaga kerja. Kelebihan pasokan tenaga kerja dalam jumlah besar menimbulkan masalah ketenagakerjaan yang serius dan tersebar luas yaitu: pengangguran, meledaknya sektor informal dan setengah pengangguran (Sigit, 2000).

Masalah serius dalam ketenagakerjaan meliputi pengangguran, setengah pengangguran dan rendahnya kualitas tingkat hidup pekerja. Masalah ini sudah lama menjadi masalah serius dan tidak banyak berkurang selama 40 tahun pembangunan di Indonesia. Bahkan ketika terjadi “Keajaiban Ekonomi” (ekonomi tumbuh cepat dalam tahun sembilan-puluhan) struktur ekonomi yang timpang cenderung kurang membaik, sehingga kondisi ketenagakerjaan tidak banyak perubahan.

Pemanfaatan SDM sebagai suatu manifestasi dari kualitas SDM lebih sering dilihat dalam dimensi tenaga kerja. Sasaran utama pembangunan di bidang

ketenagakerjaan meliputi penciptaan lapangan kerja baru dengan jumlah dan kualitas yang memadai sehingga dapat menyerap angkatan kerja yang dapat memasuki pasar kerja.

Pada bab ini disajikan gambaran umum mengenai keadaan angkatan kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Pengangguran Terbuka, Lapangan Usaha, dan Status Pekerjaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (biasanya disebut sebagai penduduk usia kerja) yang masuk dalam pasar kerja baik yang bekerja maupun masih menganggur, yang biasa disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Dengan TPAK akan dapat dilihat besarnya penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah atau negara serta dapat menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk produksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk usia kerja, jumlah angkatan kerja juga terus bertambah. Sementara tumbuhnya lapangan kerja tidak berbanding lurus dengan pertambahan angkatan kerja, terutama tenaga kerja yang baru (*new entrance*).

Pada 2012 terjadi peningkatan TPAK dibanding 2011, yaitu dari 68,77 menjadi 70,85. Peningkatan ini disebabkan karena peningkatan TPAK laki-laki maupun perempuan. Namun demikian penurunan ataupun peningkatan TPAK belum dapat secara langsung menggambarkan kondisi baik buruknya ketenagakerjaan suatu wilayah. Peningkatan TPAK seperti yang ditunjukkan oleh tabel 4.1, perlu ditelusuri lebih jauh lagi, apakah lebih dipengaruhi oleh tingkat pengangguran ataukah oleh tingkat penyerapan tenaga kerja (penduduk yang bekerja) untuk kurun waktu tersebut.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, TPAK laki-laki selalu menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan. Hal ini sesuai dengan peran laki-laki sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, sehingga lebih aktif dalam kegiatan ekonomi. Pada Agustus 2012, TPAK laki-laki mencapai 80,34 persen, sementara TPAK perempuan tercatat 61,78 persen.

**Pada 2012 terjadi penurunan
TPAK dan TPT**

Tabel 4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di D.I Yogyakarta, 2011 - 2012
Table 4.1 Labor Force Participation Rate in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2011 - 2012

Jenis Kelamin/Sex	2011	2012
(1)	(2)	(3)
Laki-laki/ <i>Male</i>	78,35	80,34
Perempuan/ <i>Female</i>	59,61	61,78
L+P/ <i>Male/Female</i>	68,77	70,85

Sumber: Sakernas 2011-2012 (Agustus)

Source: National Labour Force Surveys 2010-2011 (August)

Pengangguran Terbuka

Menganggur adalah kondisi dimana seseorang yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged workers*), atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja/mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (*future starts*).

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT memberikan indikasi besarnya penduduk usia kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT merupakan perbandingan antara banyaknya penganggur dengan jumlah angkatan kerja. Naiknya tingkat pengangguran terbuka dapat berarti adanya penurunan daya serap tenaga kerja atau dapat juga berarti bahwa kecepatan laju kesempatan kerja tidak dapat mengimbangi kecepatan laju pertumbuhan angkatan kerja.

Tabel 4.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2011 - 2012
Table 4.2 Open Unemployment Rate in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2011 - 2012

Jenis Kelamin/Sex	2011	2012
(1)	(2)	(3)
Laki-laki/Male	3,88	4,11
Perempuan/Female	4,08	3,79
L+P/Male/Female	3,97	3,97

Sumber: Sakernas 2011-2012 (Agustus)
 Source: National Labour Force Surveys 2011-2012(August)

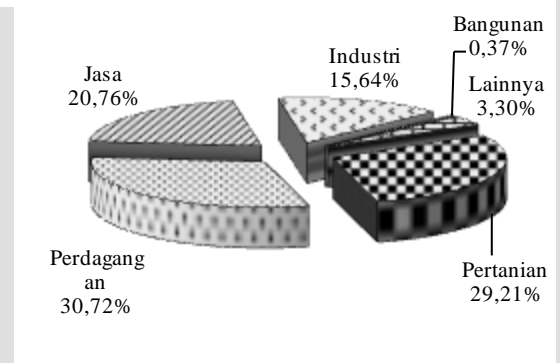
Dari Agustus 2011 ke 2012 TPT secara agregat tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 3,97 persen. Namun jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki mengalami peningkatan sedangkan TPT perempuan mengalami penurunan. Hal ini

menggambarkan bahwa selama setahun terakhir dari setiap 100 angkatan kerja yang ada terdapat pengangguran sekitar 4 orang. Nilai TPT yang stabil selama dua tahun terakhir menunjukkan bahwa peningkatan daya serap tenaga kerja sebanding dengan peningkatan angkatan kerja. Sehingga kondisi ini dapat memberi pengaruh yang baik pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Lapangan Usaha

Proporsi pekerja menurut lapangan usaha merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Semakin besar proporsi pekerja di sektor primer (pertanian) dianggap semakin tinggi ‘*under utilities*’ pekerja, karena sektor pertanian di Indonesia masih merupakan sektor dengan produktivitas terendah.

Gambar 4.1: Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha, Agustus 2012



Tabel 4.3 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Lapangan Usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2011-2012

Table 4.3 Percentage of Population 15 Years Old and Over Who Worked During The Previous Weeks by Main Industry in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2011-2012

Lapangan Usaha Utama/ Main Industry	2011	2012
(1)	(2)	(3)
Pertanian/ <i>Agriculture</i>	23,97	29,21
Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	0,69	0,11
Industri/ <i>Manufacturing Industry</i>	14,83	15,64
Listrik, Gas dan Air Minum/ <i>Electricity, Gas, and Water</i>	0,24	0,08
Bangunan/ <i>Construction</i>	7,40	0,37
Perdagangan, rumah makan, dan hotel/ <i>Trade, Restaurant, and Hotel</i>	26,70	30,72
Transportasi & Komunikasi/ <i>Transportation & Communication</i>	3,79	1,04
Keuangan/ <i>Financing</i>	2,78	2,07
Jasa/ <i>Services</i>	19,60	20,76
Jumlah/ <i>Total</i>	100,00	100,00

Sumber: Sakernas 2011–2012 (Agustus)
Source: National Labour Force Surveys 2011-2012 (August)

Berdasarkan Tabel 4.3 terlihat bahwa terdapat tiga sektor yang cukup dominan dalam menyerap tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi sektor perdagangan, hotel, restoran, sektor pertanian, dan sektor jasa. Sektor perdagangan, hotel, restoran merupakan lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak, diikuti sektor

pertanian pada urutan kedua dan sektor jasa pada urutan ketiga.

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata dan kota pendidikan berpengaruh positif terhadap perkembangan sektor perdagangan dan jasa yang ditunjukkan oleh besarnya persentase penyerapan tenaga kerja di kedua sektor tersebut, masing-masing sebesar 30,72 persen dan 20,76 persen pada Agustus 2012.

Kontribusi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian pada Agustus 2012 sekitar 29,21 persen. Angka ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan kondisi Agustus 2011 yaitu sebesar 23,97 persen. Sektor pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta meskipun tidak lagi merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbanyak, tetapi masih cukup besar tingkat penyerapan tenaga kerjanya. Pertanian yang masih ada merupakan pertanian tradisional, jadi kecenderungannya masih bersifat padat karya. Banyaknya pekerja di sektor ini diduga tidak memberikan produksi pertanian sebanyak yang diharapkan.

Status Pekerjaan

Indikator yang digunakan untuk memberikan gambaran tentang kedudukan pekerja adalah status pekerjaan. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2011

maupun 2012, persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja selama seminggu terbanyak berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai. Pada Agustus 2012 yang berstatus buruh/karyawan/ pegawai mencapai 39,06 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 40,12 persen.

Persentase penduduk yang berusaha sendiri pada Agustus 2012 mencapai 12,69 persen. Sementara yang berusaha dengan dibantu orang lain, baik buruh tetap atau buruh tidak tetap/tidak dibayar terdapat sekitar 23,16 persen. Sisanya sekitar 25,09 persen merupakan pekerja bebas atau pekerja keluarga/tidak dibayar.

Tabel 4.4 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu menurut Status Pekerjaan Utama di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2011-2012

Table 4.4 Percentage of Population 15 Years Olds and Over Who Worked During The Previous Weeks by Employment Status in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2011-2012

Status pekerjaan utama/ <i>Employment Status</i>	2011	2012
(1)	(2)	(3)
Berusaha Sendiri <i>Self Employed</i>	13,91	12,69
Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar <i>Employed Assisted by Temporary Employee/Unpaid Worker</i>	19,35	18,78
Berusaha dibantu Buruh Tetap <i>Employed Assisted by Employer</i>	4,27	4,38
Buruh/Karyawan/Pegawai <i>Paid Worker</i>	40,12	39,06
Pekerja Bebas di Pertanian <i>Self Employed in Agriculture</i>	1,39	2,21
Pekerja Bebas di Non Pertanian <i>Self Employed in Non Agriculture</i>	7,02	6,50
Pekerja Keluarga/tak Dibayar <i>Unpaid Worker</i>	13,95	16,38

Sumber: Sakernas 2011 –2012 (Agustus)

Source: National Labour Force Surveys 2011 – 2012 (August)

Kondisi sosial ekonomi masyarakat lebih reflektif jika dilihat dari tingkat penghasilan rumah tangga. Namun dalam operasionalnya di lapangan, untuk mendapatkan data penghasilan rumah tangga bukanlah hal yang mudah. Keterbukaan dan kesediaan rumah tangga sendiri untuk memberikan informasi yang sesungguhnya masih dirasa kurang kooperatif. Untuk itulah digunakan pendekatan konsumsi (*consumption approach*) untuk melihat tingkat penghasilan rumah tangga.

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan rakyat adalah jumlah dan persentase penduduk miskin. Berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan pendapatan penduduk yang meningkat, sedangkan meningkatnya jumlah penduduk miskin memberi indikasi menurunnya pendapatan penduduk.

Pola konsumsi penduduk juga merupakan salah satu indikator sosial ekonomi masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat. Budaya setempat dan perilaku lingkungan akan membentuk pola kebiasaan tertentu pada sekelompok masyarakat

dimana mereka berada. Dengan menggunakan data pengeluaran dapat diungkapkan tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran guna menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk.

Penduduk Miskin

Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya (didekati dengan pengeluaran) lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup secara layak di wilayah tempat tinggalnya. Kebutuhan untuk hidup layak tersebut diterjemahkan sebagai sejumlah nilai rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan makan setara 2.100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang paling esensial yang terdiri atas perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aneka barang dan jasa lainnya.

Penduduk miskin relatif lebih banyak ditemukan di wilayah pedesaan dari pada yang tinggal di perkotaan. Pada 2012 di

Daerah Istimewa Yogyakarta ditemukan 15,43 persen penduduk miskin yang terdistribusi di wilayah pedesaan sebanyak 19,29 persen, sedangkan di wilayah perkotaan hanya 13,43 persen.

Pada 2012, sebanyak 15,43 persen penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta hidup dibawah garis kemiskinan

Tabel 5.1: Persentase Penduduk menurut Tipe Daerah dan Status Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012
Table 5.1: Percentage of Population by Type of Place and Social Status in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012

Tipe Daerah <i>Type of Place</i>	Status Sosial <i>Social Status</i>	
	Penduduk Tidak Miskin <i>Not Poor</i>	Penduduk Miskin <i>Poor</i>
(1)	(2)	(3)
Kota/ <i>Urban</i>	86,57	13,43
Desa/ <i>Rural</i>	80,71	19,29
Kota+Desa/ <i>Urban+Rural</i>	84,57	15,43

Sumber: Susenas 2012 (Maret)
Source: 2012, National Socio Economic Survey (March)

Perkembangan Distribusi Pendapatan

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara tidak hanya mengejar peningkatan pendapatan secara makro, tetapi juga harus memperhatikan pemerataan pendapatannya.

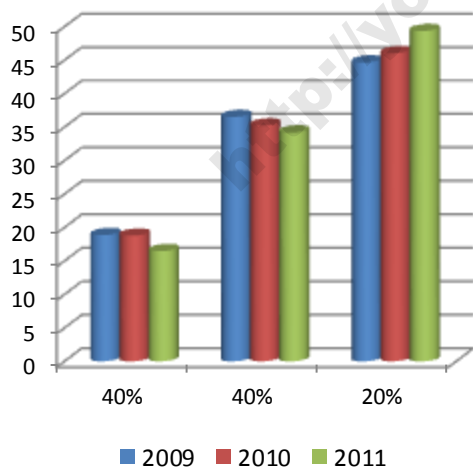
Oleh karena itu peningkatan pendapatan idealnya diikuti dengan pemerataan pendapatan, karena pemerataan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Tidak tersedianya data pendapatan menyebabkan penghitungan distribusi pendapatan pada ulasan ini menggunakan data pengeluaran sebagai proxy pendapatan.

Untuk melihat tingkat ketimpangan pendapatan penduduk dapat digunakan kriteria ketimpangan dari Bank Dunia, yaitu dengan melihat persentase pengeluaran yang mampu dibelanjakan oleh kelompok 40 persen penduduk yang berpendapatan paling rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Selain kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia ada indikator yang juga sering digunakan yaitu Indeks Gini.

Ketimpangan distribusi pendapatan yang berkepanjangan selain menciptakan kemiskinan, dapat pula menimbulkan masalah sosial

Berdasarkan kriteria Bank Dunia di Daerah Istimewa Yogyakarta, selama 2010-2012 terlihat pada kelas 40 persen penduduk berpendapatan rendah menunjukkan kecenderungan menurun yaitu dari 16,46 persen pada tahun 2011 menjadi 15,29 persen pada tahun 2012. Keadaan ini menggambarkan bahwa pada kelas 40 persen penduduk berpendapatan rendah memburuk dengan tingkat ketimpangan pendapatan sedang. Sebaliknya pada kelompok penduduk berpendapatan tinggi terlihat adanya kenaikan persentase yaitu dari 49,34 persen pada tahun 2011 menjadi 51,56 persen pada tahun 2012.

Gambar 5.1: Persentase Pengeluaran Penduduk menurut Kelompok Penduduk 2011-2012



Pada tahun 2012 tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran lebih tinggi dibanding tahun 2011

Indikator Gini (*Gini Ratio*), dengan nilai koefisien berkisar antara 0-1 merupakan indikator yang sering digunakan untuk menentukan tingkat ketimpangan pendapatan. Semakin mendekati 0 dapat dikatakan bahwa tingkat ketimpangan antar kelompok pengeluaran semakin rendah, sebaliknya apabila semakin mendekati angka 1 dikatakan tingkat ketimpangan pengeluaran tinggi/semurna.

Dari Tabel 5.2 dapat dilihat bahwa menurunnya porsi pengeluaran penduduk berpendapatan rendah diikuti dengan naiknya koefisien gini, yaitu dari 0,3149 pada 2011, naik menjadi 0,43 pada 2012. Fenomena ini menunjukkan bahwa pada tahun 2012 tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran lebih tinggi dibanding tahun 2011. Untuk negara berkembang, koefisien gini berkisar antara 0,3000 sampai dengan 0,4000 termasuk dalam kategori ketimpangan sedang.

Tabel 5.2 Persentase Pengeluaran menurut Kelompok Penduduk dan Angka Gini di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2012

Table 5.2 Percentage Expenditure of Several Population Groups and Coefficient Gini in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2012

Tahun/ Year	40% terendah/ Low	40% menengah / Middle	20% tertinggi/ Hight	Angka Gini/ Gini Coefficient
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	18,77	35,22	46,02	0,3088
2011	16,46	34,19	49,34	0,3149
2012	15,29	33,15	51,56	0,43

Sumber : Susenas 2010-2012

Source : 2010- 2012 National Socio Economic Survey

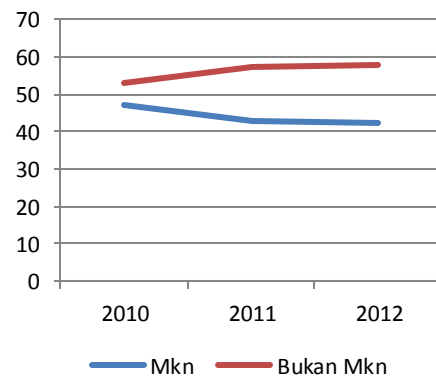
Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang

tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau ditabung.

Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Gambar 5.2: Persentase Pengeluaran Perkapita sebulan Makanan dan Bukan Makanan di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010 -2012



Tabel 5.3 Persentase Pengeluaran per Kapita sebulan di D.I Yogyakarta, 2010 - 2012

Table 5.3 Monthly Expenditure per Capita by Food and Non-Food Group in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010 – 2012

Tahun/ Year	Makanan/ Food	Bukan Makanan/ Non Food
(1)	(2)	(3)
2010	47,27	52,73
2011	42,71	57,29
2012	42,44	57,56

Sumber : Susenas 2010-2012

Source : 2010- 2012 National Socio Economic Survey

Pada Tabel 5.3 terlihat bahwa persentase pengeluaran untuk bukan makanan pada 2012 lebih tinggi dibandingkan dengan keadaan pada 2011. Sebaliknya pada 2012 persentase pengeluaran untuk makanan mengalami penurunan yaitu dari 42,71 persen pada tahun 2011 menjadi 42,44 persen pada tahun 2012.

Persentase pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi menunjukkan angka tertinggi

Tabel 5.4 Komposisi Pengeluaran per Kapita sebulan menurut Jenis Pengeluaran di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2012

Table 5.4 Composition of Consumption Expenditure per Capita per Month in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010 and 2012

Komposisi/Composition	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(3)
1. Padi-padian/Cereals	6,56	5,54	5,73
2. Umbi - umbian/Tubers	0,28	0,23	0,23
3. Ikan/Fish	1,37	1,24	1,26
4. Daging/Meat	1,84	1,65	1,76
5. Telur dan Susu/Egg and milk	3,83	2,97	2,96
6. Sayur-sayuran/Vegetables	4,11	3,12	2,69
7. Kacang-Kacangan/Legumes	1,98	1,57	1,47
8. Buah-buahan/Fruit	2,10	2,36	2,31
9. Minyak/Lemak/Oil and fats	1,46	1,43	1,33
10. Bahan minuman/Beverage flavour stuffs	2,15	1,84	1,79
11. Bumbu-Bumbuan/Spices	0,75	0,58	0,55
12. Konsumsi Lainnya/Miscellaneous food	1,37	0,90	0,84
13. Makanan & Minuman Jadi/Prepared food	15,37	16,24	16,10
14. Tembakau dan sirih/ Tobacco and betel	4,08	3,03	3,42
Jumlah Makanan/Total of Food	47,27	42,71	42,44

Sumber : Susenas , 2010-2012

Source : 2010-2012, National Socio Economic Survey

Pengeluaran konsumsi makanan penduduk per kapita sebulan menurut jenis kelompok komoditi mempunyai pola yang hampir sama dari tahun 2010 ke tahun 2012.

Pengeluaran penduduk terbesar dialokasikan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman jadi, kemudian padi-padian. Walaupun memiliki pola yang hampir sama tetapi porsi konsumsi makanan dan minuman mengalami sedikit fluktuasi dari 2010 ke 2012. Sementara itu untuk konsumsi padi-padian mengalami penurunan dari 6,56 persen pada 2010 menjadi 5,54 persen pada 2011 dan mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2012 menjadi 5,73 persen.

Pada 2012 pengeluaran bukan makanan mencapai 57,56 persen dan pengeluaran tertinggi pada aneka barang dan jasa yaitu 23,45 persen

Pada Tabel 5.5 jumlah pengeluaran kelompok bukan makanan pada 2012 mengalami peningkatan yang cukup besar dibanding tahun sebelumnya, yaitu dari 52,73 persen tahun 2011 menjadi 57,29 persen pada 2012. Persentase pengeluaran terbesar dari kelompok bukan makanan pada tahun 2012 masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu kelompok aneka barang dan jasa diikuti kelompok perumahan.

Tabel 5.5 Komposisi Pengeluaran per Kapita sebulan menurut Jenis Pengeluaran di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2012

Table 5.5 *Composition of Consumption Expenditure per Capita per Month in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010- 2012*

Komposisi/Composition	2010	2011*)	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
Perumahan/ <i>Housing</i>	20,70	18,94	18,68
Barang dan Jasa/ <i>Miscellaneous Good and service</i>	21,67	25,34	23,45
Pakaian, Alas kaki & tutup kepala/ <i>Cloting, footwear &</i>	2,61	3,22	2,88
Barang Tahan lama/ <i>Durable Goods</i>	4,61	6,21	8,87
Pajak dan Asuransi/ <i>Taxes and Insurances</i>	2,34	2,11	1,95
Keperluan Pesta dan upacara/ <i>Parties and ceremonies</i>	0,79	1,48	1,73
Jumlah bukan makanan/ <i>Total of Non Food</i>	52,73	57,29	57,56

Sumber : Susenas , 2010-2012

Source : 2010-2012, *National Socio Economic Survey*

*)Mulai Tahun 2011 Susenas dilaksanakan secara triwulanan

Konsumsi Energi dan Protein

Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka kecukupan konsumsi energi dan protein untuk tingkat

konsumsi sehari-hari berdasarkan Widyakarya Pangan dan Gizi ke-8 tahun 2004 masing-masing sebesar 2.000 kkal dan 52 gram protein.

Rata-rata konsumsi kalori penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012 sebanyak 1.794,06 kkal atau turun sebesar 38,20 kkal dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini berarti konsumsi kalori per hari penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta belum memenuhi syarat kecukupan gizi berdasarkan Widya Karya Pangan dan Gizi ke-8, untuk tahun 2012 masih kurang sebanyak 205,94 kkal.

Rata-rata konsumsi protein per kapita penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta per harinya mengalami fluktuasi selama tiga tahun terakhir, yaitu 52,89 gram pada tahun 2010, naik menjadi 53,81 gram pada tahun 2011 dan turun menjadi 52,08 gram pada tahun 2012. Untuk konsumsi protein, jumlah yang dikonsumsi penduduk pada tahun 2010 sampai dengan 2012 sudah berada di atas batas kecukupan gizi.

Apabila dibandingkan menurut daerah tempat tinggal, terlihat bahwa rata-rata konsumsi kalori penduduk perkotaan pada tahun 2012 sedikit lebih rendah bila dibandingkan penduduk perdesaan yaitu 1.793,33 kkal untuk perkotaan dan 1.795,50 kkal untuk perdesaan. Sementara untuk

protein, rata-rata konsumsi protein penduduk perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan penduduk yang tinggal di daerah perdesaan. Pada tahun 2012 rata-rata konsumsi protein penduduk perkotaan sebesar 53,70 gram sedangkan di perdesaan sebesar 48,92 gram. Selama tiga tahun terakhir rata-rata konsumsi protein penduduk di daerah perdesaan belum memenuhi standar kecukupan gizi (52 gram per kapita per hari).

Tabel 5.6 Konsumsi Energi dan Protein per Kapita per Hari Menurut Daerah Tempat Tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2012

Table 5.6 Energy and Protein Consumption per Capita per Day by Type of Area in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010- 2012

Tahun/Year	Kota/ Urban	Desa/ Rural	Kota+Desa Urban/Rural
(1)	(2)	(3)	(4)
Energi (kkal)			
2010	1 854,76	1 847,17	1 852,05
2011	1 802,31	1 891,16	1 832,26
2012	1.793,33	1.795,50	1.794,06
Protein (gram)			
2010	54,21	50,50	52,89
2011	54,80	51,87	53,81
2012	53,70	48,92	52,08

Sumber : Susenas , 2010-2012 (Maret)
Source : 2010-2012, National Socio Economic Survey (Maret)

Perkiraan Produksi Pertanian

Pertanian merupakan mata pencaharian utama sebagian besar penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Usaha pertanian yang dilakukan antara lain adalah pertanian tanaman pangan, seperti padi dan jagung yang merupakan kebutuhan pokok penduduk. Tabel 5.7 menunjukkan produksi beras dan jagung pada tahun 2010-2012.

Tabel 5.7 Produksi Beras dan Jagung per Kapita per Tahun (Kuintal) di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010 - 2012

Table 5.7 Annually Product of Rice and Maize per Capita (Quintal) in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010 - 2012

Uraian/ Explanation	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
Beras/Rice	5.169.067	5.288.568	5.980.135
Jagung/Maize	3.455.760	2.915.960	3.366.080
Penduduk/ Population*	3 457 491	3 487 327	3.514.762
Per kapita/ Per capita			
Beras/Rice	1,49	1,52	1,70
Jagung/Maize	0,99	0,84	0,96

Sumber : BPS, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2012

Source : BPS, Daerah Istimewa Yogyakarta Province in figure 2012

Ket./ Note: *) Estimasi BPS / BPS Estimation

Produksi beras pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 13,08 persen dibandingkan 2011, yaitu dari 5.288.568 kuintal menjadi 5.980.135 kuintal, sementara

produksi jagung mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 3.366.080 kuintal menjadi 3.366.080 kuintal atau naik sekitar 15,44 persen.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, penyediaan per kapita beras tahun 2012 mengalami sedikit kenaikan dibanding tahun sebelumnya dari 1,52 kuintal menjadi 1,70 kuintal beras per kapita. Untuk komoditas jagung mengalami kenaikan dari 0,84 kuintal perkapita menjadi 0,96 kuintal per kapita.

Bab 6 *Perumahan & Permukiman*

Housing & Settlement

Perumahan dan permukiman selain merupakan kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Terwujudnya kesejahteraan rakyat dapat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan rumah dan lingkungan yang sehat dan nyaman. Oleh karena itu, pembangunan perumahan dan permukiman menjadi salah satu prioritas utama dalam meningkatkan sumber daya manusia.

Rumah selain sebagai bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, rumah juga sebagai sarana pembinaan keluarga.

Perumahan dalam konteks yang lebih luas disebut permukiman, yaitu tempat tinggal anggota masyarakat dan individu-individu yang biasanya hidup dalam ikatan perkawinan atau keluarga beserta berbagai fasilitas pendukungnya. Perumahan menjadi tempat untuk tumbuh, hidup, berinteraksi,

perlindungan dari gangguan, dan fungsi lainnya bagi penghuninya. Rumah selain sebagai bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, rumah juga sebagai sarana pembinaan keluarga. Dalam fungsinya sebagai tempat tinggal rumah sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan status sosial dari pemiliknya. Sebagai sarana pembinaan keluarga, rumah diharapkan mampu menghasilkan hasil yang maksimal yaitu tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menurut Krieger and Higgins (2002), selain merupakan kebutuhan dasar manusia, rumah juga merupakan determinan kesehatan masyarakat. Perumahan yang layak untuk tempat tinggal harus memenuhi syarat kesehatan, sehingga penghuninya tetap sehat. Perumahan yang sehat, nyaman dan asri adalah rumah yang mampu menunjang kondisi kesehatan tiap penghuninya. Hal ini tidak lepas dari ketersediaan prasarana dan sarana terkait, seperti tersedianya fasilitas penerangan, sumber air minum, tersedianya jamban, dan lantai yang memenuhi standar kesehatan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kelengkapan fasilitas pokok/standar tempat tinggal merupakan sebagian faktor penentu kenyamanan dan kesehatan suatu tempat tinggal. Keberadaan fasilitas-fasilitas tersebut pada gilirannya akan menentukan kualitas tempat tinggal tersebut. Fasilitas pokok tersebut antara lain tersedianya fasilitas penerangan, sumber air minum, tersedianya jamban, dan lantai bukan tanah sebagai jenis lantai utama yang memenuhi standar kesehatan.

Sumber Penerangan

Laju pertumbuhan pengguna listrik untuk rumah tangga menunjukkan peningkatan setiap tahun. Tahun 2012, jumlah pengguna listrik untuk rumah tangga mampu tumbuh 4,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara laju pertumbuhan pengguna listrik tahun 2011 baru tercatat sebesar 3,74 persen. Bagi pelanggan rumah tangga, listrik PLN umumnya digunakan untuk penerangan.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan penggunaan listrik, pemerintah melalui PLN terus meningkatkan produksinya. Hal ini ditunjukkan dengan semakin bertambahnya listrik yang diproduksi dan terjual dari tahun ke tahun. Pada 2012 banyaknya listrik yang diproduksi

mencapai 2.199.138.432 kwh atau meningkat 8,96 persen dibandingkan tahun 2011. Di lain pihak banyaknya listrik yang dijual mencapai 2.043.752.015 kwh, mengalami kenaikan 9,30 persen dibanding listrik yang dijual pada tahun 2011.

Tabel 6.1 Banyaknya Pelanggan Listrik, Listrik yang Diproduksi dan Terjual di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2012

Table 6.1 Number Consumer Electricity, Electricity Generated and Sold in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010 – 2012

Tahun/ Year	Pengguna Listrik untuk RT Consumer Electricity (Pelanggan)	Listrik yang diproduksi/ Electricity Produced (KWH)	Listrik yang dijual/ Electricity by Sales (KWH)
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	760.554	1.975.726.468	1.809.022.224
2011	788.976	2.018.312.691	1.869.768.571
2012	825.014	2.199.138.432	2.043.752.015

Sumber : PLN Wil. XIII, Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta

Source : *Government Electricity Company for Area XIII Distribution of Yogyakarta Subdivision*

Berdasarkan Tabel 6.1 menunjukkan bahwa banyaknya listrik yang terjual selama 3 tahun selalu memperlihatkan peningkatan.

Selain data bersumber dari PLN, penggunaan listrik oleh rumah tangga juga diperoleh dari susenas. Listrik merupakan sumber penerangan yang lebih baik

dibandingkan dengan sumber penerangan lainnya. Hal ini disebabkan karena listrik lebih praktis dan modern, serta tidak menimbulkan polusi. Rumah tangga yang menggunakan listrik dianggap mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Berdasarkan data susenas, persentase rumah tangga pengguna listrik dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan, dari tahun 2010 sebesar 99,59 persen menjadi 99,40 persen pada tahun 2012.

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2012

Table 6.2 Percentage of Household by Source of Lighting in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010 -2012

Tahun/ Year	Sumber Penerangan/Source of Lighting				Jumlah/ Total
	Listrik PLN/ State Electricity	Petromak, Aladin/ Pumped Lamp	Pelita, Sentir/ Oil Lamp	Lainnya/ Others	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2010	99,59	0,02	0,36	0,03	100,00
2011	99,55	0,04	0,37	0,04	100,00
2012	99,40	0,00	0,45	0,15	100,00

Sumber : Susenas 2010-2012

Source : 2010-2012 National Socio Economic Survey

Sumber Air Minum

Indikator tingkat kesejahteraan suatu daerah dapat dilihat dari kondisi kesehatan rumah tangga. Ketersediaan air bersih dan air minum suatu perumahan merupakan aspek

cukup penting untuk menunjang kondisi kesehatan bagi penghuninya.

Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum bersih pada 2012 tercatat sebesar 89,37 persen.

Air minum bersih merupakan air minum yang bersumber dari air kemasan bermerek, air isi ulang, air leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Selama tiga tahun terakhir, penggunaan sumber air minum bersih terbanyak oleh rumah rumah tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dari sumur atau mata air terlindung dan menunjukkan tren meningkat setiap tahun. Tahun 2012, persentase rumah tangga menggunakan sumur atau mata air terlindung mencapai 56,49 persen sementara pada tahun sebelumnya tercatat sebesar 56,37 persen.

Di sisi lain, persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum bersih sedikit mengalami peningkatan yaitu dari 89,12 persen pada tahun 2011 menjadi 89,37 persen pada tahun 2012.

Tabel 6.3 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2012

Table 6.3 Percentage of Household by Source of Drinking Water in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010 -2012

Tahun/ Year	Sumber air minum/Source of Drinking Water					
	Air Kemasan/ Packaging Water	Ledeng/ Pipe	Pompa/ Pump	Sumur/ Mata Air Terlindung g/ Protected well/Prote c- ted spring	Sumur/ Mata Air Tidak Terlindung g/ Unprotect ed well/Unpr o- tected spring	Lainnya/ Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2010	18,22	7,03	8,12	56,32	7,01	3,31
2011	16,15	9,00	7,60	56,37	7,40	3,48
2012	18,79	7,85	6,24	56,49	7,35	3,28

Sumber : Susenas 2010-2012

Source : 2010-2012 National Socio Economic Survey

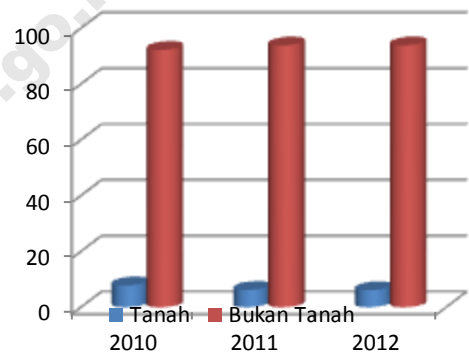
Di sisi lain, persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum bersih sedikit mengalami penurunan yaitu dari 89,12 persen pada tahun 2011 menjadi 84,27 persen pada tahun 2012.

Jenis Lantai

Aspek kedua yang mengindikasikan kondisi kesehatan rumah tangga meningkat adalah peningkatan jumlah rumah tangga dengan jenis lantai terluas tempat tinggal bukan tanah. Tahun 2012, sebesar 93,88 persen rumah tangga di Daerah Istimewa

Yogyakarta dengan jenis lantai terluas tempat tinggal bukan tanah. Di sisi lain rumah tangga dengan rumah tinggal berlantai tanah pada 2012 mencapai 6,12 persen. Angka ini mengalami sedikit penurunan dibanding 2011 yang mencapai 7,20 persen.

Gambar 6.1: Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas, 2012



Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menata kembali atau membangun rumah tinggal mereka dengan lantai bukan tanah.

Tabel 6.4 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas dari Tempat Tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2012

Table 6.4 Percentage of Household by primary construction material of the floor of living quarter in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010 - 2012

Tahun/ Year	Jenis Lantai/ Type of floor	
	Tanah/ Earth	Bukan Tanah/ Non Earth
(1)	(2)	(3)
2010	7,81	92,19
2011	6,20	93,80
2012	6,12	93,88

Sumber : Susenas 2010- 2012

Source : 2010-2012 National Socio Economic Survey

Tempat Pembuangan Air Besar

Seperti tahun sebelumnya persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas buang air besar jenis kloset leher angsa tahun 2012 ini menduduki peringkat pertama. Pada tabel 6.4 memperlihatkan bahwa 90,70 persen rumah tangga telah menggunakan tempat pembuangan air besar jenis leher angsa. Sementara persentase rumah tangga yang menggunakan plengsengan dan cemplung pada tahun 2010 hingga tahun 2012 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, dari 10,40 persen pada tahun 2010 menjadi 9,23 pada tahun 2012.

Semakin banyak rumah tangga yang menggunakan fasilitas jenis leher angsa,

mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat untuk menggunakan fasilitas tempat pembuangan air besar yang lebih sehat semakin meningkat. Hal ini dikarenakan jenis leher angsa dianggap sebagai tempat pembuangan air besar yang paling sehat, karena dibawahnya terdapat saluran berbentuk huruf “U” untuk menampung air sehingga bau tinja tidak bisa keluar.

Tabel 6.5 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kloset di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2012

Table 6.5 Percentage of Households by Closet Facility in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2012

Tahun/ Year	Jenis Kloset Closet Facility			Jumlah/ Total
	Leher Angsa Swan Trine	Plengsengan Cemplung/Cub luk Pit Privy	Tidak ada None	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	89,37	10,40	0,23	100,00
2011	89,44	10,38	0,18	100,00
2012	90,69	9,23	0,08	100,00

Sumber : Susenas 2010-2012

Source : 2010-2012 National Socio Economic Survey

Banyaknya rumah tangga yang mempunyai jarak sumber air minum ke tempat penampungan kotoran lebih dari 10 m, pada 2012 mengalami penurunan, yaitu menjadi 74,81 persen.

Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Penampungan

Jarak penampungan kotoran yang terlalu dekat dengan sumber air minum kemungkinan besar dapat menyebabkan perembesan ke dalam sumber air minum sehingga akan mempengaruhi kualitas air untuk keperluan rumah tangga.

Pada 2012 persentase rumah tangga yang mempunyai sumber air minum dengan jarak ke tempat penampungan kotoran kurang dari atau sama dengan 10 m tercatat sebanyak 19,39 persen, hal ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2010 yaitu sebesar 17,88 persen. sedangkan yang mempunyai jarak lebih dari 10 m dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 mengalami penurunan yaitu 77,46 persen pada tahun 2010 menjadi 74,81 persen pada tahun 2012. Hal tersebut kemungkinan disebabkan karena semakin terbatasnya ketersediaan lahan untuk perumahan, sehingga jarak penampungan dengan sumber air minum semakin kecil.

Untuk jarak penampungan kotoran pada tahun 2012 yang tidak tahu atau TT adalah sebesar 5,80 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 yang tercatat sebesar 3,79 persen.

Tabel 6.6 Persentase Rumah Tangga menurut Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Penampungan di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010 - 2012

Table 6.6 Percentage of Household by Distance Between Source of Drinking Water to Septic Tank or other Toilet Discharge in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010 - 2012

Tahun/ Year	Jarak ke penampungan kotoran/ Distance to Septic Tank or Other Toilet Discharge (m)		
	< 10	≥ 10	TT
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	17,88	77,46	4,66
2011	17,43	78,78	3,79
2012	19,39	74,81	5,80

Sumber : Susenas 2010-2012

Source : 2010-2012 National Socio Economic Survey

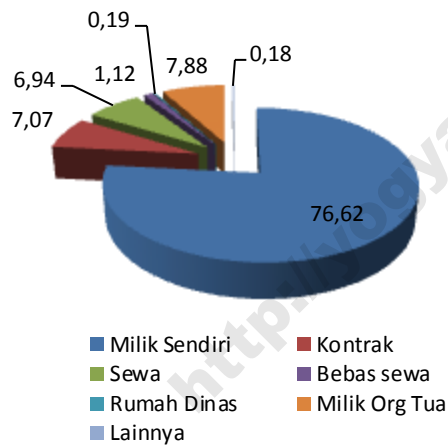
Hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah pembangunan perumahan yang semakin meningkat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ke depan diharapkan agar maraknya pembangunan pemukiman perumahan dengan lahan yang relatif terbatas tetap diikuti dengan perencanaan lingkungan yang teratur, sehat, dan memadai.

Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Selain fasilitas perumahan yang telah disebutkan di atas, untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat dan juga peningkatan taraf hidup adalah status

kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup adalah rumah milik sendiri, kontrak, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjangkau dan permanen dalam jangka panjang.

Gambar 6.2: Persentase Status Kepemilikan Bangunan tempat Tinggal, 2012



Berdasarkan hasil susenas 2012 di Daerah Istimewa Yogyakarta, rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 76,62 persen, sedangkan sisanya 23,38 persen menempati rumah bukan milik sendiri. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri terdiri dari 7,07

persen kontrak, sewa 6,94 persen, bebas sewa 1,11 persen, rumah dinas 0,19 persen, milik orang tua/saudara 7,88 persen dan lainnya 0,18 persen.

Tabel 6.7 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta 2010-2012

Table 6.7 Percentage of Households by Housing Ownership Status in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2012

Status Kepemilikan Rumah Tinggal/ Tenure of Housing Unit	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
Milik Sendiri / Own	74,50	76,51	76,62
Kontrak / Lease	7,99	7,36	7,07
Sewa / Rent	8,96	6,62	6,94
Bebas Sewa / Rent free	1,72	1,87	1,12
Rumah Dinas / Official	0,82	0,40	0,19
Milik Orang Tua, Saudara / Parent property	5,79	7,14	7,88
Lainnya / Other	0,23	0,10	0,18

Sumber : BPS, Susenas 2010-2012

Source : BPS, 2010-2012 National Socio Economic Survey

Bab 7 *Sosial Lainnya*

Other Social

Selain aspek yang telah disebutkan di depan, aspek sosial lainnya yang dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat antara lain: pariwisata, akses perjalanan, akses terhadap media informasi dan komunikasi, tingkat keamanan, dan akses terhadap kehidupan spiritual.

Wisata yang merupakan kebutuhan tersier masyarakat dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan. Pada umumnya, semakin sejahtera seseorang, semakin tinggi peluang untuk memenuhi kebutuhan non primer. Tingkat kesejahteraan sosial masyarakat dapat dilihat dari tingkat kunjungan wisatawan. Makin tinggi tingkat kunjungan wisatawan dapat memberi dampak penambahan kesejahteraan masyarakat melalui belanja dari kunjungan para wisatawan.

Kepemilikan dan akses terhadap media informasi merupakan basis perkembangan pengetahuan seseorang yang dapat merubah pandangan dan cara hidupnya ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, kepemilikan dan akses terhadap media informasi juga dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan seseorang.

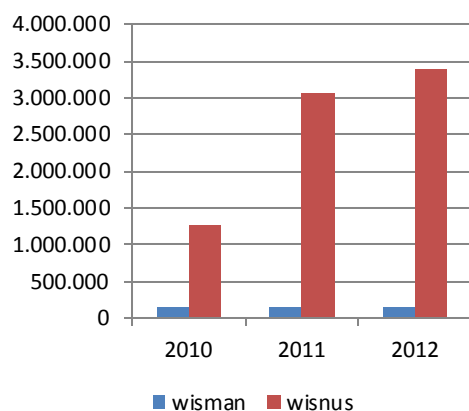
Selain itu kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari kegiatan non ekonomi yang menyangkut kebutuhan spiritual seperti keagamaan. Waktu yang dimiliki tidak semata-mata untuk kegiatan mencari nafkah. akan tetapi juga harus bisa meluangkan waktu untuk kegiatan keagamaan. Khususnya pada masyarakat muslim, tingkat kesejahteraan bisa dilihat dari peningkatan jumlah jamaah haji dari waktu ke waktu.

Tingkat kesejahteraan sosial masyarakat dapat dilihat dari tingkat kegiatan sosial dan budaya

Pariwisata

Pariwisata sebagai sektor andalan di Daerah Istimewa Yogyakarta, senantiasa diusahakan untuk dikembangkan serta ditingkatkan eksistensinya. Beberapa hal yang menunjukkan perkembangan kepariwisataan adalah, indeks wisatawan yang menginap di fasilitas penginapan seperti hotel maupun losmen. Selama 2012 jumlah wisatawan manca negara yang menginap di losmen dan hotel mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan 2011.

Gambar 7.1: Jumlah Wisatawan yang Menginap di Losmen dan Hotel, 2010-2012



Secara umum, banyaknya wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang menginap di losmen dan hotel selama 2012 mengalami peningkatan sebesar 10,6 persen dengan besaran indeks 165 (2004=100).

Tabel 7.1 Indeks Wisatawan yang Menginap di Losmen dan Hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta (2004 = 100), 2010-2012

Table 7.1 Index of Tourist who Spent The Night in Hotel in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2012

Tahun Year	Wisman/ Foreign Tourist	Indeks/ Index	Wisnus/ Domestic Tourist	Indeks/ Index	Wisnus+ Wisman/ Dom.+ For. Tourist	Indeks/ Index
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2010	140.648	165	2.850.994	138	2.991.642	139
2011	148.756	175	3.057.578	148	3.206.334	149
2012	148.496	174	3.397.835	164	3.546.331	165

Sumber: BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2012

Source: 2012, BPS-Statistics of Daerah Istimewa Yogyakarta Province

Perjalanan

Konsep perjalanan yang digunakan BPS dalam Susenas adalah perjalanan yang dilakukan penduduk dalam wilayah geografis Indonesia secara sukarela kurang dari 6 bulan dan bukan untuk tujuan memperoleh upah/gaji ditempat yang dikunjungi atau sekolah serta bersifat perjalanan bukan rutin. Berdasarkan tabel 7.2, selama periode 2011-2012, persentase penduduk yang melakukan perjalanan mengalami penurunan, yaitu dari 19,90 persen pada tahun 2011 menjadi 19,87 persen pada tahun 2012. Apabila dilihat menurut jenis kelamin, tidak ada perbedaan

yang mencolok antara laki-laki dan perempuan dalam hal melakukan perjalanan.

Tabel 7.2 Persentase Penduduk yang Melakukan Perjalanan Menurut Jenis Kelamin di Daerah Istimewa Yogyakarta 2010-2012
 Table 7.2 *Percentage of Population Who Made Recreational Trips by Sex in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2012*

Tahun/Year	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	17,47	17,05	17,26
2011	20,38	19,44	19,90
2012	20,44	19,32	19,87

Sumber : BPS, Susenas 2010-2012

Source : BPS, 2010-2012 National Socio Economic Survey

Akses pada Teknologi Komunikasi dan Informasi

Dalam era globalisasi yang terjadi dewasa ini, berbagai informasi yang ada di seluruh dunia dapat diakses melalui berbagai media termasuk media elektronik. Pada tabel 7.3 tampak bahwa rumah tangga yang menguasai PC semakin menurun selama 3 tahun terakhir, tetapi untuk rumah tangga yang menguasai laptop/note book semakin meningkat. Pada tahun 2010 rumah tangga yang menguasai laptop/note book baru mencapai 15,77 persen, pada tahun 2012 sudah mencapai 22,87 persen. Ternyata

laptop/note book lebih banyak disukai daripada PC.

Penggunaan telepon seluler sebagai sarana atau alat komunikasi pada saat ini lebih populer di kalangan masyarakat dibandingkan telepon biasa, meskipun harga telepon seluler maupun pulsanya lebih mahal. Telepon seluler banyak diminati karena lebih praktis sehingga memudahkan penggunaan berkomunikasi di mana pun berada dengan ditunjang oleh jangkauan jaringan yang semakin meluas. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya persentase rumah tangga yang menguasai telepon biasa dibandingkan yang menguasai telepon seluler. Ada kecenderungan terjadi penurunan penggunaan telepon biasa selama tahun 2010-2012. Sebaliknya penggunaan telepon seluler terlihat meningkat dalam kurun waktu yang sama.

Tabel 7.3 memperlihatkan bahwa selama tahun 2010-2012 rumah tangga yang menguasai telepon biasa mengalami penurunan dari 10,17 persen menjadi 9,06 persen, sedangkan rumah tangga yang menguasai telepon seluler meningkat dari 80,76 persen menjadi 85,81 persen.

Tabel 7.3 Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses teknologi Komunikasi dan Informasi Menurut Jenis Alat Komunikasi dan Informasi di Daerah Istimewa Yogyakarta 2010-2012

Table 7.3 Percentage of Household with Access to Communication and Information Technologies by Types of Communication Information Tools in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2012

Alat Komunikasi/Communications and Information Tools	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
Telepon/Telephone	10,17	10,17	9,06
Telepon Seluler/Mobile Cellular	80,76	85,09	85,81
PC/Desktop/Computer	15,71	13,95	12,78
Laptop/Note Book	15,77	18,92	22,87

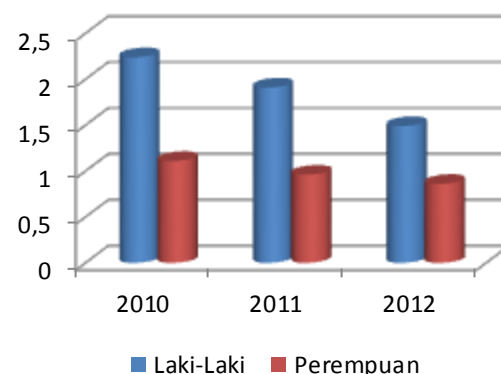
Sumber : BPS, Susenas 2010-2012

Source : BPS, 2010-2012 National Socio Economic Survey

Tindak Kejahatan

Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah tingkat keamanan di suatu wilayah. Pada tabel 7.4 memperlihatkan bahwa penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan selama kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami sedikit penurunan. Pada tahun 2010 penduduk yang menjadi korban kejahatan sebanyak 1,67 persen turun menjadi 1,42 persen pada tahun 2011 dan turun lagi menjadi 1,17 persen pada tahun 2012.

Gambar 7.2: Persentase Penduduk yang pernah Menjadi Korban Kejahatan



Apabila dilihat menurut jenis kelamin, penduduk laki-laki lebih banyak menjadi korban kejahatan dibandingkan penduduk perempuan. Pada tahun 2012, penduduk laki-laki yang menjadi korban kejahatan sebanyak 1,49 persen, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 0,86 persen.

Tabel 7.4 Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Jenis Kelamin di Daerah Istimewa Yogyakarta 2010-2012

Table 7.4 Percentage of Population Who Ever Became the Victim of Criminal Acts by Sex in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2012

Tahun Year	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	2,24	1,11	1,67
2011	1,91	0,96	1,42
2012	1,49	0,86	1,17

Sumber : BPS, Susenas 2010-2012

Source : BPS, 2010-2012 National Socio Economic Survey

Jamaah Haji

Pembangunan kehidupan beragama bertujuan untuk meningkatkan kualitas umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan, ketaqwaan, dan kerukunan. Salah satu upaya yang dilakukan antara lain melalui peningkatan pelayanan jemaah haji.

Perkembangan jumlah jemaah haji selama tiga tahun terakhir ini terlihat fluktuatif. Pada tahun 2011 terjadi peningkatan jumlah jemaah haji di bandingkan tahun 2010, sedangkan pada tahun 2012 terjadi penurunan dibandingkan tahun 2011. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya pemeluk agama Islam disertai dengan peningkatan bimbingan dan pelayanan pemerintah yang lebih baik dalam pelaksanaan ibadah haji, serta peningkatan kesadaran menjalankan rukun islam ke 5 menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya jumlah Jamaah Haji. Jadwal tunggu keberangkatan yang sekarang ini sudah mencapai 10 tahun, bukan menjadi penghambat minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji.

Jumlah jemaah haji di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012 turun sebesar 5,41 persen dibandingkan tahun 2011

Tabel 7.5 Banyaknya Pemeluk Agama Islam, Jemaah Haji, dan Rasio Jemaah Haji per 100.000 Penduduk Pemeluk Agama Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010 - 2012

Table 7.5 Number of Moslem, Haji Pilgrim, and Ratio of Haji Pilgrim per 100,000 Moslem in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010- 2012

Tahun/ Year	Banyaknya/Total			Rasio per 100.000 pemeluk agama Islam/ Ratio
	Pemeluk agama Islam/ Moslem	Jemaah haji/ Haji Pilgrim		
		Laki- Laki/ Male	Perempu an/ Female	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	3.264.529	1.507	1.658	96,95
2011	3.242.727	1.613	1.657	100,84
2012	3.349.561	1.465	1.628	92,34

Sumber : Kanwil Kemenag. Daerah Istimewa Yogyakarta

Source : Regional Office of Religious Affairs Department of Daerah Istimewa Yogyakarta

Dari Tabel 7.5 terlihat bahwa pada 2012 ada sebanyak 3.093 jemaah haji dari Daerah Istimewa Yogyakarta, atau turun 5,41 persen dari tahun 2011. Rasio jemaah haji per 100.000 penduduk pemeluk agama Islam pada 2012 sebesar 92,34. Ini berarti bahwa dari setiap 100 ribu penduduk muslim sekitar 92 penduduk menunaikan ibadah haji pada 2012. Di lain pihak jika dilihat menurut jenis kelamin, jumlah jemaah haji perempuan lebih banyak dibanding jumlah jemaah haji laki-laki. Jamaah haji laki-laki sebanyak 1.465

orang sedangkan jamaah haji perempuan
mencapai 1.628 orang.

<http://yogyakarta.bps.go.id>

**Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun
menurut Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, 1980-2010**
Annual Growth Rate by Regency/City in Daerah Istimewa Yogyakarta, 1980-2010

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Tahun/Year		
	1980-1990	1990-2000	2000-2010
(1)	(3)	(4)	(4)
Kulonprogo	- 0,22	- 0,04	0,48
Bantul	0,94	1,19	1,57
Gunungkidul	- 0,13	0,30	0,07
Sleman	1,43	1,50	1,90
Yogyakarta	0,34	0,39	-0,21
Daerah Istimewa Yogyakarta	0,58	0,72	1,04

Sumber: Sensus Penduduk 1980, 1990, 2000, 2010
Source : 1980, 1990, 2000, 2010 Population Census

**Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan
Status Perkawinan di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012**
*Percentage of Population 10 Years Old and Over by Regency/City
and Marital Status in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, 2012*

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Status perkawinan/ <i>Marital Status</i>				Jumlah/ <i>Total</i>
	Belum kawin/ <i>Single</i>	Kawin/ <i>Married</i>	Cerai hidup/ <i>Divorced</i>	Cerai mati/ <i>Widowed</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	26,37	63,60	1,52	8,51	100,00
Bantul	31,43	59,42	1,81	7,33	100,00
Gunungkidul	21,27	68,45	1,73	8,54	100,00
Sleman	34,23	57,33	1,47	6,97	100,00
Yogyakarta	42,23	48,28	1,89	7,59	100,00
Daerah Istimewa Yogyakarta	31,00	59,72	1,67	7,62	100,00

Sumber: Susenas 2012
Source : 2012, National Social Economic Survey

**Persentase Wanita Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota
dan Umur Perkawinan Pertama di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012**
*Percentage of Population Ever Marriage by Regency/City and Age
at First Marriage in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012*

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Umur perkawinan pertama/ <i>Age of First Marriage</i>				Jumlah/ <i>Total</i>
	≤ 16	17 – 18	19 - 24	25 +	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	8,01	17,83	53,02	21,14	100,00
Bantul	5,87	18,30	57,35	18,48	100,00
Gunungkidul	13,62	26,78	49,28	10,32	100,00
Sleman	6,50	13,62	54,50	25,38	100,00
Yogyakarta	4,57	12,39	54,17	28,87	100,00
Daerah Istimewa Yogyakarta	7,95	18,20	53,84	20,01	100,00

Sumber: Susenas 2012

Source : 2012, National Social Economic Survey

Lampiran 2.1

**Persentase Balita menurut Kabupaten/Kota
dan Penolong Pertama Waktu Lahir di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012**
*Percentage of Children Under Fives by Regency/City and First of Birth Attendant
in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012*

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Penolong pertama waktu lahir/ <i>First of Birth Attendant</i>				
	Dokter/ <i>Doctor</i>	Bidan/ <i>Midwife</i>	Tenaga medis lain/ <i>Other Medical Personnel</i>	Dukun/ <i>Traditional Birth Attendant</i>	Lainnya/ <i>Others</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	21,56	75,66	0,00	2,78	0,00
Bantul	39,57	58,01	0,40	0,45	1,57
Gunungkidul	16,26	83,00	0,00	0,74	0,00
Sleman	39,20	52,63	0,85	0,99	6,33
Yogyakarta	58,92	38,87	1,51	0,00	0,70
Daerah Istimewa Yogyakarta	35,00	60,99	0,54	0,90	2,57

Sumber: Susenas 2012

Source : 2012, National Social Economic Survey

**Persentase Balita menurut Kabupaten/Kota dan
Penolong Terakhir Waktu Lahir di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012**
*Percentage of Children Under Fives by Regency/City and Last of Birth Attendant
in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012*

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Penolong terakhir waktu lahir/ <i>Last of Birth Attendant</i>				
	Dokter/ <i>Doctor</i>	Bidan/ <i>Midwife</i>	Tenaga medis lain/ <i>Other Medical Personnel</i>	Dukun/ <i>Traditional Birth Attendant</i>	Lainnya/ <i>Others</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	28,04	70,18	0,00	1,78	0,00
Bantul	46,05	51,53	0,40	0,45	1,57
Gunungkidul	18,06	80,92	0,29	0,73	0,00
Sleman	42,71	56,29	0,00	1,00	0,00
Yogyakarta	57,22	41,24	1,54	0,00	0,00
Daerah Istimewa Yogyakarta	38,78	59,69	0,32	0,79	0,42

Sumber: Susenas 2012

Source : 2012, National Social Economic Survey

**Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan
Tempat Berobat di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012**
*Percentage of Population Treated Outpatient by Regency/City and Place
of Medical in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012*

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Rumah Sakit <i>Hospital</i>	Praktek Dokter <i>Medical doctor</i>	Puskesmas <i>Health center</i>	Petugas Kesehatan <i>Paramedical</i>	Praktek Tradisional <i>Traditional Treatment</i>	Lainnya <i>Others</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
Kulonprogo	13,91	33,00	36,43	18,58	0,61	1,89
Bantul	18,28	30,83	23,87	27,35	1,79	2,37
Gunungkidul	9,91	43,92	30,89	22,30	0,65	0,23
Sleman	19,66	34,05	25,11	22,42	2,52	2,29
Yogyakarta	24,37	39,16	36,01	5,39	4,70	2,91
Daerah Istimewa Yogyakarta	16,83	35,93	28,90	21,17	1,89	1,85

Sumber: Susenas 2012

Source : 2012, National Social Economic Survey

**Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan
Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2011**
*Percentage of Population 15 Years of Age and Over by Regency/City and Level of
Educational Attainment in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2011*

Kabupaten/ Kota Regency/City	Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan									Jumlah Total
	Tdk/Blm Pernah Sekolah Never/ Not Yet Attended School	Tdk/Blm Tamat SD/ Not Com- plete Primary School	SD Primary School	SMTP Junior High School	SMU Senior High School	SMK Vocatio- nal Senior High School	D1/D2 Diploma I/II	D3/SM Academy Diploma III	D4/Univ Univer- sity/ Diploma IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
Kulonprogo	6,81	12,75	22,03	22,23	13,80	15,81	0,91	1,58	4,08	100,00
Bantul	6,65	11,36	17,32	22,11	20,68	13,04	0,64	2,87	5,33	100,00
Gunungkidul	15,19	12,64	28,58	26,16	8,99	5,75	0,47	0,61	1,61	100,00
Sleman	4,59	6,18	13,94	17,50	25,24	16,97	1,17	3,49	10,92	100,00
Yogyakarta	1,59	4,03	9,28	18,27	34,57	10,86	0,96	5,38	15,06	100,00
Daerah Istimewa Yogyakarta	7,11	9,28	18,05	21,02	20,68	12,90	0,84	2,77	7,35	100,00

Sumber: Susenas 2011

Source : 2011, National Social Economic Survey

**Persentase Penduduk 7-24 Tahun menurut Golongan Umur,
Jenis Kelamin dan Jenjang Partisipasi Bersekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012**
*Percentage of Population 15 Years of Age and Over by Regency/City and Level of Educational
Attainment in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012*

Kelompok Umur Age Group	Laki-laki Male			Perempuan Female			Laki-laki + Perempuan Male + Female		
	Belum/ Tidak Pernah Berse- kolah Never/Not Yet Attended School	Masih Sekolah Attending School	Tidak Berseko- lah Lagi Attending School Anymore	Belum/ Tidak Pernah Berse- kolah Never/Not Yet Attended School	Masih Sekolah Attending School	Tidak Berseko- lah Lagi Attending School Anymore	Belum/ Tidak Pernah Berse- kolah Never/Not Yet Attended School	Masih Sekolah Attending School	Tidak Berseko- lah Lagi Attending School Anymore
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7 – 12	0,23	99,69	0,08	0,15	99,85	0,00	0,19	99,77	0,04
13 – 15	0,69	98,12	1,19	0,00	98,53	1,47	0,35	98,32	1,33
16 – 18	0,00	81,33	18,67	0,00	79,10	20,90	0,00	80,22	19,78
19 – 24	0,47	44,71	54,82	0,19	43,90	55,91	0,33	44,32	55,35

Sumber: Susenas 2012

Source : 2012, National Social Economic Survey

**Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Utama
Selama Seminggu yang Lalu dan Tipe Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2011**
*Percentage of Population 15 Years Old and Over by Main Activity During
The Previous Weeks and Type of Place in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2011*

Kegiatan utama/ <i>Main Activity</i>	Tipe Daerah <i>Type of Place</i>		
	Kota <i>Urban</i>	Desa <i>Rural</i>	Kota + Desa <i>Urban + Rural</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Bekerja/ <i>Working</i>	64,69	74,67	68,04
Pengangguran/ <i>Unemployment</i>	3,07	2,30	2,81
Mengurus rumah tangga/ <i>House Keeping</i>	16,77	11,59	15,03
Sekolah/ <i>Attending School</i>	11,34	7,90	10,18
Lainnya/ <i>Others</i>	4,14	3,54	3,94
Jumlah/Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sakernas Agustus 2011

Source: National Labour Force Surveys in August 2011

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Tipe Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012

Percentage of Population 15 Years Old and Over who Worked During the Previous Weeks by Main Industry and Type of Place in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012

Lapangan Pekerjaan Utama <i>Main Industry</i>	Jenis Kelamin <i>Sex</i>		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Laki-laki +Perempuan <i>Male+Female</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian/ <i>Agriculture</i>	25,05	29,21	26,91
Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarring</i>	1,23	0,11	0,73
Industri/ <i>Manufacturing Industry</i>	14,72	15,64	15,13
Listrik, Gas dan Air Minum/ <i>Electricity, Gas, and Water</i>	0,20	0,08	0,15
Bangunan/ <i>Construction</i>	12,56	0,37	7,11
Perdagangan, rumah makan, dan hotel/ <i>Trade, Restaurant, and Hotel</i>	20,14	30,72	24,87
Transportasi dan Komunikasi/ <i>Transportation & Communication</i>	5,10	1,04	3,28
Keuangan/ <i>Financing</i>	3,87	2,07	3,06
Jasa/ <i>Services</i>	17,14	20,76	18,76
Jumlah/Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sakernas Agustus 2012

Source: National Labour Force Surveys in August 2012

**Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu
menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin
di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012**

*Percentage of Population 15 Years Old and Over who Worked During
The Previous Weeks by Main Employment Status and Sex in D.I.Yogyakarta, 2012*

Status pekerjaan utama/ <i>Main Employment Status</i>	Jenis Kelamin <i>Sex</i>		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Laki-laki+ Perempuan <i>Male+Female</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha Sendiri <i>Self Employed</i>	11,98	13,57	12,69
Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar <i>Employed Assisted by Temporary Employee/ Unpaid Worker</i>	22,46	14,24	18,78
Berusaha dibantu Buruh Tetap <i>Employed Assisted by Employer</i>	5,45	3,06	4,38
Buruh/Karyawan/Pegawai <i>Paid Worker</i>	41,89	35,56	39,06
Pekerja Bebas di Pertanian <i>Self Employed in Agriculture</i>	2,22	2,19	2,21
Pekerja Bebas di Non Pertanian <i>Self Employed in Non Agriculture</i>	9,96	2,21	6,50
Pekerja Keluarga/tak Dibayar <i>Unpaid Worker</i>	6,05	29,18	16,38
Jumlah/ <i>Total</i>	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sakernas Agustus 2012

Source: National Labour Force Surveys in August 2012

**Persentase Penduduk menurut Kabupaten/Kota dan Status Sosial
di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012**
*Percentage of Population by Regency/City and Urban/Rural
in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012*

Kabupaten/kota <i>Regency/City</i>	Status Sosial/ <i>Social Status</i>		
	Penduduk Miskin/ <i>Poverty</i>	Penduduk Tidak Miskin/ <i>Not Poverty</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Kulonprogo	23,32	76,68	100,00
Bantul	16,97	83,03	100,00
Gunungkidul	22,72	77,23	100,00
Sleman	10,44	89,56	100,00
Yogyakarta	9,38	90,62	100,00
Daerah Istimewa	15,88	84,12	100,00

Sumber: Susenas Juli 2012

Source : July 2012, National Social Economic Survey

**Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota
dan Sumber Penerangan di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012**
*Percentage of Households by Regency/City and Source of Lighting
in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012*

Kabupaten/Kota <i>Regency/ City</i>	Sumber penerangan/ <i>Source of Lighting</i>				
	Listrik PLN/ <i>PLN Electricity</i>	Listrik non PLN/ <i>Non PLN Electricity</i>	Petromak/ Aladin/ <i>Pumped Lamp</i>	Pelita/Sentir/ <i>Oil Lamp</i>	Lainnya/ <i>Others</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	99,13	0,00	0,00	0,87	0,00
Bantul	99,32	0,00	0,00	0,68	0,00
Gunungkidul	99,03	0,00	0,00	0,75	0,22
Sleman	99,55	0,32	0,00	0,13	0,00
Yogyakarta	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIY	99,41	0,10	0,00	0,45	0,04

Sumber: Susenas 2012

Source : 2012, National Social Economic Survey

**Banyaknya Pelanggan Listrik menurut Unit Pelayanan
di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2012**
*Number of Consumers of Electrical Power by Service Unit
in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2012*

Unit Pelayanan <i>Service Unit</i>	Tahun/ <i>Year</i>		
	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
Kulonprogo	86 430	89 056	93.066
Bantul	141 789	145 929	153.105
Gunungkidul	137 063	141 280	148.285
Yogya Selatan	101 515	104 312	109.127
Yogya Utara	74 413	76 812	80.256
Sleman	108 039	112 168	117.255
Sedayu	94 450	98 206	102.837
Kalasan	76 086	83 764	87.885
Daerah Istimewa	819 785	851 527	891.816

Sumber: PLN Wilayah XIII Cabang Yogyakarta

Source : Government Electricity Company for Area XIII Distribution of Yogyakarta Sub Division

Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012
Percentage of Households by Regency/City and Source of Drinking Water in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2011

Kabupaten/Kota <i>Regency/ City</i>	Sumber air minum/ <i>Source of Drinking Water</i>					
	Air dlm Kemasan/ <i>Packaging Water</i>	Ledeng/ <i>Pipe</i>	Pompa/ <i>Pump</i>	Sumur/Mata Air Terlindung/ <i>Protected well/Protected spring</i>	Sumur/Mata Air Tidak Terlindung/ <i>Unprotected well/Unprotected spring</i>	Air hujan, lainnya/ <i>Rain Water, Others</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kulonprogo	3,68	8,16	1,87	72,45	13,37	0,47
Bantul	11,40	3,22	7,95	71,12	6,31	0,00
Gunungkidul	1,16	23,31	3,92	37,62	16,91	17,08
Sleman	30,49	2,01	2,37	61,87	3,26	0,00
Yogyakarta	42,36	9,06	20,07	27,76	0,75	0,00
Daerah Istimewa	18,79	7,85	6,23	56,50	7,35	3,28

Sumber: Susenas 2012

Source : 2012, National Social Economic Survey

Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Penampungan Kotoran/Tinja Terdekat di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012
Percentage of Households by Regency/City and Distance Between Source of Drinking Water to Nearest Septic Tank or Other Sanitary Facilities in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012

Kabupaten/kota <i>Regency/City</i>	Jarak penampungan/ <i>Distance (M)</i>		
	≤10	>10	Tidak tahu <i>Unknown</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Kulonprogo	10,72	85,72	3,56
Bantul	25,84	71,57	2,59
Gunungkidul	13,94	75,55	10,51
Sleman	18,70	74,39	6,91
Yogyakarta	21,59	70,27	8,14
Daerah Istimewa	19,39	74,81	5,80

Sumber: Susenas 2012

Source : 2012, National Social Economic Survey

**Banyaknya Jemaah Haji menurut Kabupaten/Kota
di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2009 – 2012**

Number of Haji Pilgrim by Regency/City in Daerah Istimewa Yogyakarta, 2009-2012

Kabupaten/kota <i>Regency/City</i>	2009	2010	2011	2011
(1)	(3)	(4)	(5)	(5)
Kulonprogo	214	221	286	257
Bantul	719	831	955	812
Gunungkidul	193	252	314	229
Sleman	1.406	1.274	1.229	1.173
Yogyakarta	558	499	486	618
Daerah	3.090	3.077	3.270	3.093

Sumber : Kanwil Depag. Daerah Istimewa Yogyakarta

Source : *Regional Office of Religious Affairs Department of Daerah Istimewa Yogyakarta*

Daftar Pustaka/References

- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2011, *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2012*, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik, 2012, *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2009, Hasil Survey Angkatan Kerja Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta*

<http://yogyakarta.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul

Telp.: (0274) 4342234 - Fax.: (0274) 4342230

Homepage: <http://yogyakarta.bps.go.id> - E-mail: bps3400@mailhost.bps.go.id